

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING PERGURUAN TINGGI**



**Pengembangan Model Institusionalisasi Nilai
Javanese Wisdom sebagai Nilai
Resolusi Konflik bagi Partai Politik
sebagai Agen Resolusi Konflik di Yogyakarta**

**Ketua Peneliti:
Sugito, S.IP, M.Si**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pengembangan Model Institusionalisasi Nilai Javanese Wisdom Sebagai Nilai Resolusi Konflik bagi Partai Politik Sebagai Agen Resolusi Konflik di Yogyakarta
2. Identitas Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Sugito,S.IP,M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP/NIK : 163 064
 - d. Jabatan Struktural : -
 - e. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
 - f. Fakultas/Jurusan : Isipol/Ilmu Hubungan Internasional
 - g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian UMY
 - h. Alamat : Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Barat Taman Tirto Bantul Yogyakarta 55183
 - i. Telpon/Faks : (0274) 387 656/Fax: (0274) 387 646
 - j. Alamat Rumah : Gamping Rt 1/RW 5, Sleman, Yogyakarta 55294
 - k. Telpon/Faks/E-mail: 08122798169/suttho77@yahoo.com.
3. Jangka Waktu Penelitian: 2 tahun
4. Pembiayaan
 - a. Jumlah biaya yang diajukan ke Dikti : Rp. 99.650.000,-
 - b. Jumlah biaya tahun ke 1 : Rp. 42.000.000,-

Yogyakarta, 20 Oktober 2009

Mengetahui,
Dekan Fisipol

Peneliti,

Dr. H. Ahmad Nurmandi
NIK. 164

Sugito,S.IP, M.Si
163 0

Menyetujui,
Kepala Lembaga Penelitian

Ir. Gatot Supangat,MP

DAFTAR ISI

Uraian Umum	1
Abstrak	3
Bab I. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tujuan Khusus	5
1.3. Urgensi (Keutamaan Penelitian).....	6
Bab II. Studi Pustaka	7
Bab III. Metode penelitian	14
Bab IV. Pembiayaan	18
Daftar Pustaka	18
Lampiran:	
1. Justifikasi Anggaran	20
2. Dukungan Pada Pelaksanaan Penelitian	21
3. Sarana dan Prasarana	21
4. Biografi/Daftar Riwayat Hidup Peneliti	22

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dinamika citra partai politik di Indonesia mengalami fluktuasi yang sangat berarti. Dalam periode demokrasi liberal 1950-1960, partai politik merupakan organisasi yang sangat berperan penting dalam membangun demokrasi di Indonesia. Keberadaan partai politik mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik tanpa melahirkan friksi politik yang berarti. Namun dalam 10 tahun berikutnya, partai politik yang cenderung berwatak ideologis, menghasilkan friksi politik yang sangat berarti, dibubarkannya Masyumi oleh Sukarno 1959, dan pembubaran PKI oleh MPRS di 1968 telah menghasilkan citra negatif terhadap partai politik.

Berangkat dari asumsi ini, regim Orde Baru membuat kebijakan politik yang cenderung memarginalkan peran partai politik, seperti kebijakan fusi partai dan *floating mass* untuk mengendalikan partai politik agar tidak melakukan mobilisasi sampai ke akar rumput. Kebijakan ini selaras dengan paradigma pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengendalikan stabilitas politik. Diskursus ini semakin diperkuat dengan pandangan dari ungkapan Nur Cholis Madjid "*Partai No*", "*Pembangunan: Yes*", *Islam Yes, Pembangunan Yes*.

Dalam proses transisi demokrasi di Indonesia, posisi partai politik kembali mendapatkan peran yang signifikan, sehingga terjadi *booming* partai politik di 1999. Masyarakat sedemikian antusias untuk bergabung dengan partai politik, dan menyalurkan aspirasinya melalui partai politik. Namun, dialektika keberadaan partai politik kembali bergulir, masyarakat sedemikian rupa mulai "bosan" dengan perilaku partai politik dan elit politik yang cenderung mempergunakan partai politik hanya untuk kepentingan elit dan sekelompok masyarakat saja, yang terkadang hirau dengan kesejahteraan masyarakat. Hiruk pikuk dan konflik di dalam partai politik sedemikian kuat, hampir semua partai politik mengalami friksi internal yang berujung dengan perpecahan seperti yang terjadi di PDIP, Golkar, PBB, maupun PKB.

Bukan hanya itu, partai politik juga dituduh melakukan eskalasi konflik ke tingkat masyarakat, tatkala partai politik tidak mampu menyelesaikan konflik di parlemen secara elegan. Hal ini tercermin dari beragam proses pilkada yang melahirkan konflik

yang massif, seperti di Lampung, Bengkulu, Ambon, Sulawesi Selatan. Atau di tingkat nasional, *impeachment* sebagai bentuk solusi politik parlemen direspon dengan tindakan anarkhis di tingkat massa, fakta ini tercermin dalam fragmen *impeachment* terhadap Gus Dur oleh MPR, telah menghasilkan eskalasi konflik di masyarakat.

Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan Kota Budaya, sehingga seorang Nasrudin Anshory bertutur tentang bagaimana belajar dari Jogja. Sebagai kota budaya, Yogyakarta memiliki posisi yang sangat unik, bersama dengan Kraton Susuhunan Surakarta. Keunikan Yogyakarta sampai saat ini terkait dengan setting politik adalah masih terjaganya posisi politik Kraton dalam struktur pemerintahan, kondisi ini relative tidak dimiliki oleh berbagai Kraton ataupun kerajaan di seluruh Indonesia. Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta memiliki posisi yang juga unik. Hal ini ditandai dengan kemampuan Yogyakarta yang sebelumnya difahami sebagai kota agraris dengan nuansa tradisi harmonis, mampu bertatap budaya dengan beragam budaya yang dibawa oleh para siswa dan mahasiswa yang menuntut ilmu di Yogyakarta. Yogyakarta telah menjadi ruang dibangunnya prinsip multikulturalis dengan landasan harmoni.

Dalam konteks politik reformasi, Yogyakarta juga telah menjadi situs penting bagi berjalannya roda reformasi di Indonesia tahun 1998. Semua konsep politik yang menjadi landasan reformasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Ciganjur, terkonsep dan disusun di Yogyakarta. Artinya, Yogyakarta memiliki potensi yang besar untuk menjadi sentrum budaya politik reformasi di Indonesia, sehingga berbagai nilai adiluhung Yogyakarta dapat ditransformasi menjadi nilai Indonesia.

Terkait dengan dinamika politik reformasi, pola partisipasi politik di Indonesia mengalami angka yang sangat signifikan, baik yang dijalankan oleh partai politik maupun kelompok kepentingan. Tingginya partisipasi politik tersebut kemudian terlembaga dalam tatanan bangunan politik demokrasi di Indonesia. Salah satu elemen yang membangun tatanan politik demokrasi adalah partai politik. Partai politik menduduki peran sentral dalam politik demokrasi, dalam bentuk pengisian jabatan legislatif, maupun eksekutif yang harus menggunakan kendaraan partai. Partai politik juga memiliki peran dalam mendinamisir produk perundang-undangan, baik yang progresif bagi terciptanya akuntabilitas demokrasi atau bahkan sebaliknya.

Salah satu efek yang diterima partai politik tatkala mendinamisir demokrasi, partai politik adalah partai politik sering dekat dan ramah dengan politik konflik, baik dalam bentuk berdebatan ataupun sampai konfrontasi fisik, baik yang terjadi di dalam internal partai ataupun eksternal partai. Beberapa contoh konflik yang berbasis internal partai adalah banyaknya perpecahan yang terjadi dalam partai politik terkait dengan pelaksanaan Muktamar ataupun Konggres untuk memilih kepengurusan partai. PDIP, PKB, PAN, PPP, PBB, PBR merupakan contoh-contoh partai yang mengalami fragmentasi politik pasca politik Muktamar. Konflik yang berbasis lintas partai sering pada pelaksanaan Kampanye atau Penetapan Calon Kepala Daerah terpilih. Konflik antara Partai Golkar dan PKS di Depok terkait dengan hiruk pikuk Pilkada Depok, ataupun konflik antara Partai Golkar dengan PAN, PKS, PPP terkait Pilkada Maluku Utara.

Tidak terlalu salah jika kemudian terdapat pandangan dari masyarakat bahwa partai politik telah menjadi salah satu agen pengusaha konflik (*entrepreneur of conflict*). Sedemikian ramah dan jamaknya partai politik terhadap konflik, membuat banyak kalangan mengkhawatirkan peran dan fungsi partai politik, yang sejatinya berperan untuk melakukan manajemen konflik. Konflik untuk dilembagakan proses penyelesaiannya, dan bukan dipelihara untuk mempertahankan dan meluas kekuasaan partai politik.

Untuk merubah nalar memaknai konflik dari partai politik, diperlukan suatu transformasi kepartaian di Indonesia, dari nalar sebagai pengusaha konflik menjadi agen resolusi konflik. Nalar ini akan membimbing partai politik kembali ke khittah politik demokrasi, sebagai alat agregasi dan mengartikulasikan kepentingan secara damai.

Transformasi partai politik dalam memaknai konflik merupakan upaya untuk mengubah secara substantive paradigm berfikir dari partai politik untuk mendapatkan maupun mempertahankan kekuasaan melalui manajemen konflik. Selama ini terdapat kecenderungan besar bahwa partai politik lebih mengembangkan tradisi instrumentalist dalam membaca konflik. Konflik justru dipelihara bahkan diciptakan, karena dengan adanya konflik tersebut akan bisa dijadikan instrument bagi partai politik untuk memperluas kekuasaan. Semakin seseorang politisi memiliki kemampuan untuk merekayasa konflik, sekaligus memmanagement konflik tersebut, maka akan berbanding lurus dengan karir politik yang akan diperolehnya.

Destinasi dari transformasi partai politik dalam memaknai konflik adalah menguatnya tradisi dalam partai politik bahwa konflik adalah sesuatu yang hadir dan tidak bisa dihilangkan sebagai suatu konstruksi sosial. Yang diperlukan adalah mengelola konstruksi konflik tersebut secara terlembaga sehingga konflik tersebut tidak berekskalasi dalam bentuk konflik horizontal dalam masyarakat, sebagaimana yang terjadi dalam pentas politik demokrasi.

Salah satu elemen penting yang bisa dieksplorasi oleh partai politik untuk menjadi agen resolusi konflik adalah nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah *local wisdom*. Dalam konteks *Javanese Wisdom*, beragam nilai bisa digali dari berbagai kitab klasik ataupun kontemporer yang membahas dan membedah nilai luhur budaya Jawa.

Salah seorang pujangga Jawa yang mencoba mengartikulasikan nilai Jawa dalam karyanya adalah Ronggowarsito, yang telah menulis 14 kitab kuno sastra klasik Jawa yang terdiri dari *Serat Purwakandha*, *Serat pulo Kencana*, *Serat Panji Asmara Bangun*, *Serat Nagri Ngurawan*, *Serat Tawang Gantungan*, *Serat Niti Praja*, *Serat Waskithaning Nala*, *Serat Paniti Sastra*, *Serat Pamrayoga Utama*, *Serat Nirata Praketa*, *Serat Kridhamaya*, *Serat Niti Sruti*, *Serat Arjuna Wihaha*, dan *Serat Tripama*. Kitab Jawa ini memuat pitutur yang bijaksana, tidak saja "tentang" kehidupan melainkan juga "dengan" kehidupan kita. Kita seakan di ajak untuk menggeluti khasanah peradaban yang toleran antar sesama, sekaligus mengarungi laut kearifan lokal yang maha penting untuk diserap.

Terjemah dan tafsir dari keempatbelas kitab kuno yang termuat ditujukan bagi kita untuk tetap memandang hidup sebagai mana mestinya. Lumampah anut wirama dan nuting jaman kelakone, tidak bertindak grusa-grusu melainkan secara rasional dan ksatria dalam menjalani kehidupan dunia.¹

Di samping itu terdapat penulis Nasrudin Anshory, seorang budayawan yang sekarang ini mengasuh sebuah pesantren unik di Imogiri, Pesantren Giri. Tidak kurang dari 20 buku yang beliau tulis, dengan gaya tutur yang mengalir sebagaimana tulisan seorang sufi, yang membahas berbagai issue dengan alat teropong kebudayaan. Salah satu buku yang mengurai tentang nilai Jawa adalah *Berguru Pada Jogja*. Buku ini

¹ Lihat lebih jauh synopsis buku ini dalam *bukabuku.com*

merupakan antologi artikel yang ditulis untuk merespon berbagai dinamika social, politik, ekonomi yang dilihat dengan perspektif Jawa atau lebih khususnya Jogja.²

Otto Sukanto Cr, seorang penulis yang mencoba membedah berbagai tulisan pujangga Ronggowarsito dalam bukunya “Ramalan Ramalan Edan Ronggo Warsito”, dibahas secara komprehensif tentang latar belakang Ronggowarsito dan perjalanan spiritual maupun budaya. Di akhir bukunya, Otto Sukanto melampirkan beberapa serat Ronggo Warsito seperti Serat Jako Lodhang, Kalatidha, Sabdotomo dan Sabda Jati, yang sudah disertai dengan terjemahannya. Buku ini cukup membantu memahami nilai Jawa yang diyakini memiliki nilai adiluhung.³

Tentang nalar harmoni dalam tradisi, seorang peneliti Moh. Roqib melakukan penelitian tentang dinamika interaksi antara tradisi Jawa dengan tradisi luar. Dalam penelitiannya, simpul-simpul harmoni dalam budaya Jawa tercermin dalam bahasa Jawa, teologi manunggaling kawulo lan gusti, Unggah-ungguh, Kuwalat, Mangan ora Mangan Waton kumpul, Mawa Diri, Pasrah, kerja keras, maupun dalam seni music dan nyanyian Jawa.⁴

I.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kearifan lokal tentang resolusi konflik dalam naskah budaya Jawa
2. Mengidentifikasi makna resolusi konflik dalam perspektif *Javanese Wisdom*
3. Mengidentifikasi pemaknaan *Javanese Wisdom* oleh partai politik sebagai nilai resolusi konflik politik
4. Mengembangkan model resolusi konflik yang berperspektif *Javanese Wisdom* bagi partai politik sebagai agen resolusi konflik
5. Menyusun modul resolusi konflik yang berbasis *Javanese Wisdom* bagi partai politik sebagai agen resolusi konflik
6. Dan resosialisasi modul tersebut kepada pengurus Partai Politik sebagai agen resolusi konflik

² Lihat lebih jauh dalam Nasrudin Anshory Ch, Zainal Arifin Thoha, *Berguru Pada Jogja: Demokrasi dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta, Kutub, 2005

³ Otto Sukanto Cr, *op.cit.*

⁴ Lihat lebih jauh dalam Moh. Roqib, *Harmoni Dalam Budaya Jawa:Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007

I.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian ini perlu dilaksanakan untuk mendapatkan model resolusi konflik yang berbasiskan *Javanesse Wisdom*. *Javaeness Wisdom* merupakan suatu kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan bawah sadar masyarakat dalam menghadapi beragam perubahan di masyarakat Jawa. *Javanesse Wisdom* memiliki khasanah yang sangat kaya akan telaah resolusi konflik, seperti yang tercermin dalam ungkapan, **Ngluruk Tanpa Bolo, Menang Tanpo Ngasorake**, yang sedikit banyak bermakna bahwa ketika melakukan konflik tidak harus dengan mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki untuk menghancurkan pihak lawan, dan jikapun mendapatkan kemenangan tidak harus dengan menjadikan lawan menjadi terhina maupun teraniaya. Nalar *Javanesse Wisdom* ini hampir tidak dipergunakan lagi oleh partai politik, sehingga konflik politik seringkali difahami sebuah konflik ideologis yang memberikan ruang penghalalan terhadap proses dehumanisasi terhadap lawan politiknya. Justru dalam adagium politik justru lebih didominasi dengan nalar “**Tumpes Kelor**”, atau mengalahkan sekalah-kalahnya. Contoh lain dari *Javanesse Wisdom* adalah “**Wani Ngalah Dhuwur Wekasane**” atau Berani Mengalah Justru Menunjukkan Kepribadian Budi Pekerti. Dalam konteks konflik politik, seringkali konflik menjadi meluas, berlarut-larut dalam proses penyelesaian karena masing-masing pihak yang berkonflik tidak mau mengalah (*yielding*) sehingga konflik menjadi sesuatu yang kontraproduktif.

Iklim demokratisasi politik yang cenderung berbasiskan nilai liberal, menempatkan kepentingan kelompok sebagai sesuatu yang berwatak *absolute*, dan memandang kelompok lain sebagai “musuh” yang harus dikalahkan sekalah-kalahnya. Nalar demokrasi yang berwatak seperti ini jelas kontraproduktif bagi bangunan kelembagaan politik demokrasi. Demokrasi malah justru akan menjadi sumber masalah daripada sebagai sumber solusi.

Hegemoni politik⁵ yang diperankan partai politik di Indonesia, cenderung menyebabkan konflik di tingkat partai politik menjadi anarkhis dan rentan melahirkan politik kekerasan. Partai politik yang seharusnya menjadi agen bagi proses institusionalisasi proses politik, justru lebih banyak mempertunjukkan konflik politik yang jauh dari nilai insitusionalisasi. Sehingga tidak berlebihan dalam budaya politik Indonesia yang cenderung berwatak *patron-klien*⁶, perilaku elite senantiasa menjadi referensi bagi publik. Implikasinya seperti dalam pepatah Jawa, **Kebo Nusu Gudel**, bahwa perilaku anak kerbau senantiasa menirukan perilaku induk kerbau atau dalam konteks penelitian ini, perilaku elit politik di partai politik yang tidak memiliki *sense* resolusi konflik juga akan menular kepada perilaku masyarakat. Dengan menempatkan partai politik sebagai agen resolusi konflik yang memiliki *social awareness* terhadap *Javanesse Wisdom* diharapkan akan mampu membangun proses institusionalisasi politik demokrasi secara lebih baik sehingga demokrasi tidak kemudian menjadi *democracy*.

⁵ Lihat dalam tulisan Bahtiar Effendy, "Hegemoni Partai Politik", *Seputar Indonesia*, Kamis 6 Maret 2008 atau lihat dalam Sunil Bastian and Robin Luckham, "Introduction: Can Democracy Be Designed," dalam Sunil Bastian and Robin Luckham, *The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, London: Zed Books, Ltd. 2003, hal. 1-13. Robin Luckham, Anne Marie Goetz and Mary Kaldor, "Democratic Institutions dan Democratic Politics," in Sunil Bastian and Robin Luckham, *The Politics of Institutional Choice*, hal 1-13.

⁶ Lihat dalam Clark D Neher and Ross Marlay, *Democracy in Southeast Asia: The Wind and Change*, Singapore, 1999

BAB II

STUDI PUSTAKA

Studi tentang partai politik, sudah seusia dengan studi politik itu sendiri. Partai politik telah menempati ruang yang sangat signifikan dalam dinamika perkembangan ilmu politik. Dalam studi paling awal, partai politik diyakini sebagai sumber masalah daripada sumber pemecahan masalah. Adalah Thomas Jefferson maupun George Washington yang melihat bahwa partai politik cenderung mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan publik. Makna ini diambil dari konsep *party* yang berasal dari kata *part* atau bagian.⁷ Dari nalar inilah kemudian Jefferson kemudian menaruh pesimisme terhadap partai politik.

Namun studi yang optimistik dalam mensikapi partai politik diusung oleh ilmuwan politik, semisal David Easton.⁸ Dalam pandangan Easton, partai politik menjadi organ dinamisator sekaligus katalisator dalam system politik. Peran dan tugas partai politik adalah mengagregasikan, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, sekaligus melakukan pembelajaran politik kepada masyarakat.

Linz dan Stepan melakukan telah studi tentang proses membangun partai politik agar senantiasa mendapatkan legitimasi. Keduanya menyatakan bahwa pembangunan partai politik adalah bagian dari pembangunan *political society* sebagai arena politik secara spesifik bagi partai politik menata dirinya sendiri untuk memenangkan legitimasi untuk melaksanakan kontrol atas kekuasaan *publik* dan *state apparatus*⁹. Studi Linz dan Stephan memberikan makna bahwa partai politik untuk mendapatkan dukungan dari publik harus senantiasa mentransformasi diri untuk senantiasa meningkatkan kapasitas organisasi. Tanpa peningkatan kapasitas diri, maka peran partai politik sebagai agen artikulasi dan agregasi kepentingan publik akan menjadi mandul.

⁷ Lihat lebih jauh statement ini dalam buku yang ditulis Bambang Cipto, *Partai Politik*, Jakarta, Grafindo, 2000.

⁸ Lihat buku David Easton dalam Nazarudin Syamsyudin, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2001

⁹Linz and Stepan mendeskripsikan lima arena di mana konsolidasi demokrasi mengambil tempat. Konsolidasi menuntut: *a vibrant civil society, an autonomous political society, the rule of law, a usable state, dan an economic society*. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat introductory chapter dari Juan J. Linz & Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

Studi tentang partai politik juga telah dilakukan oleh Schumpeter yang mendefinisikan partai politik sebagai: *a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power*¹⁰. Dalam studinya, Schumpeter lebih memaknai partai politik adalah sarana bagi mereka yang ingin berjuang untuk mendapatkan kekuasaan sehingga partai politik yang memiliki kematangan dalam mensikapi problem masyarakatlah yang akan memenangkan proses politik kekuasaan. Kematangan yang sangat penting untuk diungkap sebagai sering tergurat dalam politik di Indonesia, bahwa perilaku partai politik sering menunjukkan sikap “kurang dewasa” dalam mensikapi masalah, sikap untuk mau menang sendiri, tidak pernah merasa salah.

Partai politik mendapatkan ruang yang luas dalam politik demokrasi, bahkan seakan keberadaan partai politik dalam diskursus demokrasi adalah sesuatu yang wajib. Donald Rothchild, telah melakukan studi yang menarik tentang keterkaitan konflik, demokrasi dan partai politik. Dalam studinya di Kenya, sebuah negara miskin di Afrika Utara, demokrasi telah menjelma menjadi sistem manajemen konflik yang handal dalam pengelolaan konflik etnik, agama ataupun ras. Kenya adalah negara yang mengalami konflik etnik yang massif, berbagai upaya negosiasi tidak banyak menghasilkan, namun dengan memberikan ruang kelompok etnik, agama, dan ras bermain dalam arena demokrasi, melalui instrumen partai politik, secara perlahan konflik cenderung berkurang.

*Democracy is a system of conflict management because it allows for the resolution of social conflicts through the rough-and-tumble competition in electoral and legislative arenas, replacing open confrontation on the battlefield for a seemingly unending process of bargaining and negotiation within the rules of the democratic game, democratic institutions offer ongoing opportunities and incentives for the continuation of bargaining and negotiation among parties in conflict.*¹¹

Studi dari Rothchild sangat menarik untuk ditransformasikan ke dalam partai politik dan demokrasi Indonesia. Kehidupan partai politik di Indonesia dalam era reformasi jelas memiliki posisi start yang lebih baik dibandingkan dengan Kenya. Partai

¹⁰ Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London: Allen&Unwin, 1943, dalam Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press, 1976. hal. 59.

¹¹ Donald Rothchild, *Racial Bargaining in Independent Kenya: A Study of Minorities and Decolonization* New York: Oxford University Press, 1993 lihat lebih jauh dalam http://www.beyondintractability.org/essay/democ_con_manag/

politik di Indonesia memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat sebagai aktor utama demokrasi dalam menghadapi regim otoritarian. Indonesia juga tidak mengalami konflik etnik, agama maupun ras secara massif, hanya ada beberapa daerah saja yang mengalami konflik etnik, ras dan agama yang massif. Posisi ekonomi Indonesia, jauh lebih baik dibandingkan dengan posisi ekonomi Kenya, hal ini bisa dilihat dari indicator ekonomi makro, GDP Kenya di tahun 2005 \$18.7 billion, dan GDP per capita \$546.80 sedangkan GDP Indonesia \$287.2 billion dan dengan GDP per capita \$1,302.20.¹²

Studi tentang keterkaitan demokrasi, partai politik dan pola manajemen konflik juga telah dilakukan oleh Ben Reilly dan Andrew Reynolds. Menurutnya, demokrasi mampu menyediakan sistem insentif yang baik untuk memperkuat pilihan moderasi dalam konflik etnik, ras dan agama, serta mampu memberikan partisipasi yang bermakna di tengah tingginya konflik dalam masyarakat.¹³ Artinya, peranan partai politik sebagai agen resolusi konflik menjadi sangat terbuka, semakin banyak partai politik memiliki visi yang kuat terhadap resolusi konflik maka stigma partai politik sebagai *contributor* dan *provocator* terhadap timbulnya konflik bisa diminimalisir sedemikian rupa.

Dari studi Rothchild maupun Ben Reilly, tercermin bahwa demokrasi selayak menjadi ruang institusionalisasi konflik dibandingkan sebagai ruang mobilisasi konflik. Sedangkan dari studi Stephan, Linz, maupun Schumpeter, partai politik memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun institusionalisasi politik, hanya partai politik yang mampu membangun institusionalisasi politik baik secara internal dan eksternal, yang akan mendapatkan kepercayaan publik.

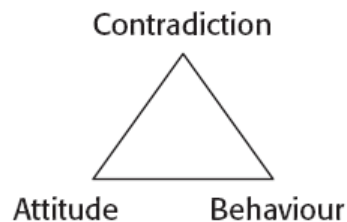
Dalam konteks inilah, gagasan partai politik sebagai agen *peace building*, *peace maker*, maupun *peace keeping* menjadi sangat bermakna. Partai politik yang mampu memerankan 3 aktivitas ini jelas akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan partai politik yang lebih suka mencitrakan diri sebagai “pedagang konflik”. Studi tentang *peace making*, *peace keeping* dan *peace building* telah dilakukan oleh Johan Galtung.¹⁴ Johan Galtung sebelumnya merumuskan dialektika konflik dalam bangunan segitiga ABC,

¹² Microsoft © Encarta © 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.

¹³ Ben Reilly and Andrew Reynolds, *Electoral Systems and Conflict in Divided Societies*, Papers on International Conflict Resolution (Washington: National Academy Press, 1999). See also *The International IDEA Handbook on Electoral System Design* (Stockholm: International IDEA, 1997).

¹⁴ Johan Galtung, *Institutionalised Conflict Resolution* dalam C.R Mitchell, *The Structure of International Conflict*, London, The City University, 2001

Attitude, Behaviour, dan Contradiction. Konflik senantiasa diawali oleh kecenderungan atau sikap terhadap pihak lain yang menjadi kompetitornya. Semakin lebar ruang kontradiksi maka semakin besar pula konflik yang akan terjadi, demikian pula implementasi dari sikap tercermin dalam perilaku, semakin ruang kontradiksi melebar maka perilaku konflik akan menjadi lebih tampak. Hal ini seperti tercermin dalam segitiga ABC berikut:



Sumber: Johan Galtung, *Institutionalised Conflict Resolution* dalam C.R Mitchell, *The Structure of International Conflict*, London, The City University, 2001

Yang paling diperlukan dalam proses pengelolaan konflik adalah, **pertama**, bagaimana melakukan manajemen terhadap ruang kontradiksi melalui internalisasi *attitude* yang ramah terhadap *competitor*. *Attitude* yang ramah terhadap resolusi hanya bisa dibentuk melalui sublimasi pengetahuan dan nilai-nilai resolusi konflik, semakin nilai yang ramah terhadap resolusi konflik lebih kompetitif terhadap nilai berkonflik, maka *attitude* seseorang atau kelompok akan menjadi lebih dekat kepada nilai-nilai resolusi konflik.

Kedua, bagaimana membentuk perilaku berkonflik yang mengedepankan perilaku yang tidak memicu eskalasi konflik. Dalam studi perilaku politik, yang dilakukan oleh Almond dan Verba¹⁵, perilaku lebih dibentuk kecenderungan attitude seseorang. Seseorang yang memiliki attitude yang ramah terhadap resolusi konflik, maka perilaku berkonfliknya cenderung mengedepankan prinsip konflik *non zero sum game*. Sebuah konflik yang lebih memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk tidak saling mengalahkan secara mutlak, namun melakukan *sharing* terhadap nilai-nilai yang menjadi sumber konflik.

¹⁵ Lihat studi perilaku politik Almond dan Verba dalam Mirriam Budihardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2005

Partai politik yang mampu membangun diri dan lingkungannya dengan nilai dan perilaku yang ramah terhadap konflik, akan menghasilkan konflik yang ada di dalam partai politik ataupun di dalam masyarakat menjadi sesuatu yang produktif. Produktif bagi partai politik, karena partai politik akan lebih berkonsentrasi terhadap upaya artikulasi dan agregasi kepentingan daripada berkonflik internal, produktif bagi demokrasi dan masyarakat, karena pilihan konflik adalah hanya mekanisme untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan nalar ini, maka konflik sebagai sarana instrumentasi mendapatkan kekuasaan bisa ditekan sedemikian rupa, sehingga ruang manipulasi konflik oleh partai politik yang selama ini sering terjadi dalam politik demokrasi di Indonesia bisa dikurangi.

Sebagaimana yang tercermin dalam segitiga perdamaian yang dikonstruksi oleh Galtung yang tercermin dalam gambar berikut.



Sumber: Johan Galtung, *Institutionalised Conflict Resolution* dalam C.R Mitchell, *The Structure of International Conflict*, London, The City University, 2001

Mengambil nalar dari Galtung, partai politik yang akan berperan sebagai agen resolusi konflik haruslah senantiasa mengembangkan segitiga perdamaian, baik sebagai aktor *peace-making*, *peace-keeping* dan *peace-building*. Hanya dengan kemampuan segitiga perdamaian inilah partai politik akan mampu menjadi agen resolusi konflik yang kredibel.

Variabel penting yang bisa dilakukan partai politik sebagai agen resolusi konflik adalah internalisasi dan eksternalisasi nilai resolusi konflik, yakni bagaimana membangun politik kepartaian dalam diri partai politik yang ramah dengan resolusi konflik, dan bagaimana membangun system politik yang juga ramah terhadap nilai

resolusi konflik. Dalam banyak studi tentang internalisasi dan eksternalisasi resolusi konflik, pengambilan nilai resolusi konflik yang berbasiskan kearifan lokal memiliki keunggulan kompartif dibandingkan dengan mengadopsi nilai-nilai resolusi konflik dari masyarakat luar. Nilai lokal cenderung lebih mudah dimengerti, dimaknai, dihayati dibandingkan dengan adopsi nilai-nilai dari luar.

Studi tentang nilai-nilai resolusi konflik dalam tradisi masyarakat Jawa sangatlah kaya. Berbagai kitab Jawa Klasik, seperti kitab Pararaton yang ditulis oleh Empu Walmiki, Kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca, Sutasoma oleh Empu Tantular memberikan informasi secara spesifik tentang dialektika budaya, politik dan konflik di Jawa. Keunikan dari kitab klasik Jawa adalah di samping membeberkan informasi dinamika konflik, juga menawarkan beragam nalar bijak yang bisa diambil sebagai hikmah peristiwa politik yang terjadi. Nalar kearifan lokal Jawa sangat tercermin dalam adalah Kitab Babad Tanah Jawi yang ditulis oleh carik Braja atas perintah Sunan Paku Buwono III, ataupun kumpulan tulisan *Ki Ronggo Warsito*, dalam kumpulan sajak dalam Surat Kalatida.

Ki Ronggo Warsito telah menulis sajak-sajak penuh makna sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan politik yang diyakini tidak memiliki kepekaan terhadap kepentingan publik. Seperti yang terungkap dalam sajak berikut:

Mangkya darajating praja, Kawuryan wus sunyaturi, Rurah pangrehing ukara, Karana tanpa palupi, Atilar silastuti, Sujana sarjana kelu, Kalulun kala tida, Tidhem tandhaning dumadi, Ardayengrat dene karoban rubeda

Keadaan negara waktu sekarang, sudah semakin merosot, Situasi (keadaan tata negara) telah rusah, karena sudah tak ada yang dapat diikuti lagi, Sudah banyak yang meninggalkan petuah-petuah/aturan-aturan lama, Orang cerdas cendekiawan terbawa arus Kala Tidha (jaman yang penuh keragu-raguan). Suasananya mencekam. Karena dunia penuh dengan kerepotan.¹⁶

Internalisasi dan eksternalisasi nilai resolusi konflik merupakan diskursus pendidikan politik. Studi tentang pendidikan politik, biasanya cenderung mengfokuskan dari pada upaya peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

¹⁶ Lihat lebih jauh sajak Ronggo Warsito dalam *Jaman Edan Cuplikan serat Kalatida oleh Pujangga Ronggo Warsito.mht*, diakses 20 Februari 2008

Penelitian semacam ini telah dilakukan oleh UIN Jakarta dan UMY yang bekerjasama dengan *The Asia Foundation* untuk program *Civic Education*.¹⁷ Merujuk dari pengalaman UIN Jakarta dan UMY, proses internalisasi dan eksternalisasi nilai harus didesain dan diinstitutionalisasi secara sistematis, guna mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Artinya, proses untuk meningkatkan kapasitas partai politik dari agen pemicu konflik menjadi agen resolusi konflik, membutuhkan institutionalisasi nilai resolusi konflik baik di dalam partai politik maupun dalam sistem politik.

Studi tentang karya Ronggo Warsito telah dilakukan oleh Otto Susanto terhadap beberapa kitab seperti Serat Purwakandha, Serat pulo Kencana, Serat Panji Asmara Bangun, Serat Nagri Ngurawan, Serat Tawang Gantungan, Serat Niti Praja, Serat Waskithaning Nala, Serat Paniti Sastra, Serat Pamrayoga Utama, Serat Nirata Praketa, Serat Kridhamaya, Serat Niti Sruti, Serat Arjuna Wihaha, dan Serat Tripama. Dalam analisisnya, Kitab Jawa ini memuat pitutur yang bijaksana, tidak saja "tentang" kehidupan melainkan juga "dengan" kehidupan kita. Terjemah dan tafsir dari keempatbelas kitab kuno yang termuat ditujukan bagi kita untuk tetap memandang hidup sebagai mana mestinya. Lumampah anut wirama dan nuting jaman kelakone, tidak bertindak grusa-grusu melainkan secara rasional dan ksatria dalam menjalani kehidupan dunia.¹⁸

Ronggo Warsito adalah seorang pujangga Islam dari kraton Surakarta, yang lahir pada hari Senin Legi, tanggal 15 Maret 1802 di desa Yosodipuran Surakarta.¹⁹ Dalam silsilah keturunan, Ranggawarsito memiliki nasab yang tersambung dengan Raja Demak Islam, yakni Raden Patah. Ronggowarsito adalah seorang pembelajar sejatinya, yang senantiasa berguru dari pesantren satu ke pesantren lainnya, bahkan dalam analisis Prof. Simuh, Ronggo Warsito sampai melakukan perjalanan intelektualnya ke Bali, untuk mendapatkan pencerahan makna kehidupan²⁰.

Selama hidupnya kurang lebih 47 tahun, Ronggowarsito telah menulis lebih dari 60 karya, baik dalam bentuk kisah, sajak, pantun maupun gubahan-gubahan. Beberapa

¹⁷ Lihat lebih jauh program pendidikan politik dalam , *Civic Education*, Yogyakarta: The Asia Foundations dan LP3 UMY, 2005

¹⁸ Lihat lebih jauh synopsis buku ini dalam bukabuku.com

¹⁹ Lihat lebih jauh dalam R.I Mulyanto, *Biografi Ronggowarsito*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1990, hal. 38

²⁰ Lihat lebih jauh dalam Simuh, *Mistik Islam Kejawaen R.Ng. Ronggowarsito*, Jakarta, UI Press, 1988.

karya utama dari Ronggo Warsito yang dikategorikan oleh Otto Susanto²¹ adalah sebagai berikut:

Pertama, *Pustaka Purwo*, sebuah kitab yang menceritakan tentang kesatria dalam lakon Mahabarata. Dalam kitab ini diinformasikan bagaimana keluarga Barata melahirkan dua tradisi yang berbeda, bahkan sangat antagonis. Ada kecenderungan bahwa konflik lebih sering terjadi antar keluarga yang berdekatan dibandingkan dengan basis keluarga yang berjauhan.

Kedua, *Kalatidha*, merupakan kitab yang menceritakan dinamika kehidupan yang silih berganti laksana roda pedati. Kitab *Kalatidha* ini memiliki perspektif yang relative sama dengan karya Ibnu Khaldun dalam kitab *Mukadimmah*, yang bertutur bagaimana sebuah peradaban mauoun kekuasaan lahir, tumbuh, berkembang, hancur dan bersiklus terus menerus. Terdapat zaman *Kalatidha*, *Kalasobo* maupun *Kolo Bendu*, jamana keagung, jaman kesejahteraan dan zaman carut marut.

Ketiga, *Jaka Lodhang*, merupakan kitab yang memberikan road map bagaimana membangun kemakmuran masyarakat. Kerja keras dan berdo'a merupakan dua kata kunci untuk mencapai zaman kesejahteraan. Dalam konteks Khaldun, disebut sebagai *Madinatul Fadhillah*, sebuah jaman kesejahteraan. Dari sinilah bisa difahami bahwa masyarakat Jawa akan mencapai jaman kesejahteraan atau *Kolosobo* manakala masyarakat Jawa memiliki etos kerja keras.

Keempat, *Sabdatomo*, sebuah kitab yang menguraikan tentang kebaikan dan keburukan yang bersumber dari perilaku manusia. Buku ini memiliki tata kemiripan dengan analisis perkembangan masyarakat yang didesain oleh Rostow yang bersifat linier, yakni dari masyarakat tradisioonal, pra tinggal landas, tinggal landas, masyarakat dengan kedewasaan, dan akhirnya masyarakat hedonisme. Masyarakat Jawa akan mendapatkan kemakmuran manakala naluri dan sifat kebaikan melekat dalam diri mereka, namun akan menuju kea rah kehancuran manakala sifat tamak dan loba mendominasi.

Sabda jati, merupakan salah satu kitab yang membentangkan nasehat-nasehat maupun ramalan tentang proses menghadapi kematian. Tulisan ini diyakini para sejarawan sebagai tulisan paling akhir dari Ronggo Warsito. Dalam tulisan ini, wajah

²¹ Lihat dalam Otto Susanto, *Ramalan-Ramalan Edan Ronggowarsito*, Yogyakarta, Ronggo Warsito, 2006.

sufistik dari Ronggowarsito sedemikian mengedepan, kepasrahan maupun kesucian hati menjadi tema sentralnya. Manusia tatkala lahir dalam posisi suci, maka tatkala hendak kembali ke sang Pencipta, maka hendaknya manusia tersebut juga dalam kondisi suci.

Di samping itu terdapat penulis Nasrudin Anshory, seorang budayawan yang sekarang ini mengasuh sebuah pesantren unik di Imogiri, Pesantren Giri. Tidak kurang dari 20 buku yang beliau tulis, dengan gaya tutur yang mengalir sebagaimana tulisan seorang sufi, yang membahas berbagai issue dengan alat teropong kebudayaan. Salah satu buku yang mengurai tentang nilai Jawa adalah *Berguru Pada Jogja*. Buku ini merupakan antologi artikel yang ditulis untuk merespon berbagai dinamika social, politik, ekonomi yang dilihat dengan perspektif Jawa atau lebih khususnya Jogja.²²

Tentang nalar harmoni dalam tradisi, seorang peneliti Moh. Roqib melakukan penelitian tentang dinamika interaksi antara tradisi Jawa dengan tradisi luar. Dalam penelitiannya, simpul-simpul harmoni dalam budaya Jawa tercermin dalam bahasa Jawa, teologi manunggaling kawulo lan gusti, Unggah-ungguh, Kuwalat, Mangan ora Mangan Waton kumpul, Mawa Diri, Pasrah, kerja keras, maupun dalam seni music dan nyanyian Jawa.²³

Dr. Purwadi adalah seorang staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UGM yang menaruh minat yang sangat kuat dan serius terhadap pelebagaan budaya Jawa dalam masyarakat. Karya-karya beliau tentang tradisi dan sejarah Jawa sangatlah banyak sekali. Tidak kurang dari 20 buku yang membahas tentang seluk beluk Jawa beliau tulis. Salah satu buku fiksi yang mengkaji tentang sejarah Jawa adalah buku yang diberinya judul “Sejarah Jawa”. Dalam buku ini dapat ditemukan berbagai nilai luhur Jawa seperti Wani Ngalah Dhuwur Wekasane, Alon-Alon Waton Klakon, Narimo ing Pandum, Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake dan berbagai nilai lainnya.

Makna sederhana dari *Ngluruk Tanpo Bolo*, bermakna ketika melakukan konflik harus dilakukan secara kesatria, yakni dengan tidak memperlebar dan merumit konflik yang ada hanya untuk mencapai kemenangan. Sedangkan terjemahan sederhana dari *Menang Tanpo Ngasorake* adalah memenangkan proses konflik ataupun kompetisi tidak

²² Lihat lebih jauh dalam Nasrudin Anshory Ch, Zainal Arifin Thoha, *Berguru Pada Jogja: Demokrasi dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta, Kutub, 2005

²³ Lihat lebih jauh dalam Moh. Roqib, *Harmoni Dalam Budaya Jawa:Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007

melalui upaya menghinakan fihak yang berhasil dikalahkan. Menang tidak untuk kemenangan diri sendiri, namun justru kemenangan untuk bersama. Fihak yang kalah tidak akan mengalami kerugian massif, demikian pula fihak pemenang tidak mendapatkan keuntungan mutlak.

Makna *Wani Ngalah Dhuwur Wekasane* adalah Yang Berani Mengalah, justru Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Sesudahnya. Nilai ini menunjukkan bahwa mengalah bukan berarti kalah, namun justru dengan mengalah menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki kebesaran hati, sebagai sifat dan watak seorang pemenang. Sedangkan terjemahan harafiah dari *Ngono Yo Ngono Ning Ngono*, begitu ya begitu, namun jangan yang begitu. Nilai ini menggambarkan bahwa dalam konflik hendak melakukan pemilahan secara seksama, mana yang mungkin untuk dilakukan mana yang tidak elok untuk dilakukan.

Terjemahan harafiah dari *Sing Iso Dirembug Yo Dirembug, lan Ojo Sak Geleme Dhewe*, adalah jika ada masalah yang bisa untuk diselesaikan maka segera diselesaikan secara baik-baik, dan jangan semaunya sendiri. Nilai ini sejatinya menggambarkan nilai-nilai agraris masyarakat Jawa, yang sesungguhnya lebih dekat dengan nilai harmoni dibandingkan dengan keinginan berkonflik. Terdapat sebuah cara pandang positif dari masyarakat agraris bahwa semua konflik pada dasarnya bisa diselesaikan secara damai, dengan syarat bahwa fihak-fihak yang berkonflik tidak mengikuti keinginannya sendiri saja.

Terjemahan harafiah dari *sepi ing pamrih, rame ing gawe* adalah ketika menjalankan sesuatu terbebas dari keinginan-keinginan individual yang tersembunyi, dan berikhtiar bekerja sebaik-baiknya dan seprofesional mungkin. Nilai ini sejatinya menunjukkan bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat agraris yang kosmopolit, masyarakat yang sangat menghargai kerja keras, pantang menyerah, dan tidak menunjukkan kepentingan pribadi yang malah akan merusak karya tersebut.

Terjemahan harafiah dari nilai-nilai *Alon-alon waton klakon*, adalah pelan-pelan asalkan bisa berjalan dan tercapai tujuannya. Nilai ini sering disalah mengerti oleh banyak kalangan dengan menjudge bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat pasif dan tidak memiliki *need for achievement* (n'ach) yang tinggi. Masyarakat Jawa bukanlah masyarakat yang progresif, tetapi masyarakat yang fatalis. Namun sejatinya nilai ini

mengandung nilai principal yang unik, bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dengan baik jika dilakukan dengan instan, proses adalah sebuah keniscayaan, sesuatu tanpa proses sesungguhnya adalah fatamorgana belaka.

Terjemahan harafiah dari *Ing Ngarso Sung Tulodho*, adalah orang yang berada di depan (menjadi pemimpin), hendaknya memberikan contoh yang baik, karena dalam masyarakat agraris, pemimpin merupakan sumber ketauladan. Pemimpin merupakan perwakilan Tuhan di muka bumi

Secara harafiah, *ing madyo mangun karso*, adalah orang yang berada di tengah harus senantiasa mengembangkan kreativitas dan kekaryaannya. Dalam konteks masyarakat Jawa, masyarakat yang berada di tengah sering dilekatkan dengan komunitas birokrasi, maupun para priyayi. Kelompok ini menjadi penghubung yang efektif antara pemimpin dan rakyat, karena kemampuan mengartikulasikan kepentingan dari masyarakat, sekaligus kemampuan mensosialisasikan kebijakan para pemimpin. Kalangan ini memiliki keunikan dalam berbahasa, yang dikenal dengan tata Kromo Madya atau bahasa halus untuk kalangan menengah.

Secara harafiah *tut wuri handayani* bermakna bahwa para pengikut hanya mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh para pemimpin yang ada di depan. Namun masih ada tambahan kata *Handayani* yang sering dimaknai sebagai kebaikan. Jadi masyarakat akan mengikuti perilaku tokoh masyarakat manakala apa-apa yang disampaikan dan dijalankan tokoh tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan.

Namun yang juga harus disadari adalah pola pelebagan nilai-nilai Jawa sebagai nilai resolusi konflik perlu dilakukan secara sistematis. Sebab-sebab, banyak sekali nilai-nilai Jawa yang memiliki makna konotatif sehingga tidak bisa dibaca secara harafiah namun harus didalami makna secara baik. Irwan Abdullah sudah melakukan penelitian tentang Penggunaan dan Penyalahgunaan Budaya dalam resolusi konflik di Indonesia.²⁴ Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemaknaan nilai resolusi konflik dari nilai budaya, dalam batas tertentu terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan, sehingga nilai tersebut bukan untuk menyelesaikan konflik, namun justru malah menjadi legitimator bagi berlangsungnya konflik.

²⁴ Irwan Abdullah, "Penggunaan dan Penyalahgunaan Budaya dalam resolusi konflik di Indonesia", *Antropologi Indonesia Vol. 25 No. 66*, 2002,

BAB III. METODE PENELITIAN

III.1. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang nilai *Javanesse Wisdom* sebagai nilai resolusi konflik dan proses institusionalisasi nilai *Javanesse Wisdom* sebagai nilai resolusi konflik tentang; 1) bagaimana posisi nilai resolusi konflik dalam naskah-naskah klasik Jawa 2) bagaimana posisi nilai resolusi konflik dalam kelembagaan partai politik 3) bagaimana proses institusionalisasi nilai resolusi konflik yang berbasiskan *Javanesse Wisdom* ke dalam struktur kelembagaan partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta

III.2. Teknik pengumpulan data

Data penelitian diperoleh studi dokumentasi terhadap naskah-naskah kitab Jawa yang sarat dengan nilai resolusi konflik yang masih bisa dilacak keberadaannya di Pusat Studi Kebudayaan, dan buku-buku yang mengulas seputar nilai-nilai Jawa. Proses ini dilakukan dua tahap, pertama, dengan mengidentifikasi literasi yang langsung membahas nilai-nilai Jawa dan politik. Kedua, mengidentifikasi literasi sastra dalam bentuk tembang-tembang, maupun prosa bebas yang memerlukan kategorisasi untuk diperoleh nilai-nilai Jawa yang memiliki relevansi dengan proses resolusi konflik. Dua tahap ini diperkaya dengan proses *deep interview* maupun FGD terhadap individu yang memiliki ekspertasi untuk menafsirkan ataupun menarik makna dari nilai-nilai Jawa secara umum ke dalam makna politik dan resolusi konflik.

III.3. Teknis analisis data

Penelitian ini menggunakan kualitatif di mana proses obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu secara alamiah. Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan *treatment*, baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpretasikan makna keluar dari obyek yang diteliti.

Penelitian diawali dengan melakukan studi literasi terkait dengan nilai-nilai Jawa yang mengandung prinsip yang berhubungan dengan Resolusi Konflik. Ada sekitar 15

yang direview dalam penelitian ini, antara lain: Beberapa karya utama dari Ronggo Warsito yang dikategorikan oleh Otto Susanto²⁵ seperti , Pustaka Purwo, Kalatidha, Jaka Lodhang, Sabdatomo, Sabda jati di mana ada kecenderungan wajah sufistik dan sinkretis dari Ronggowarsito sedemikian mengedepan.

Di samping beberapa kitab klasik yang dipaparkan di atas, terdapat sejumlah buku tentang nalar dan nilai Jawa yang ditulis oleh para budayawan dan sejarawan kontemporer. Beberapa sejarawan Jawa Modern adalah sebagai berikut;

Pertama, Dr. Purwadi. Beliau adalah seorang staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Karya-karya beliau tentang tradisi dan sejarah Jawa sangatlah banyak sekali. Tidak kurang dari 20 buku yang membahas tentang seluk beluk Jawa beliau tulis. Salah satu buku fiksi yang mengkaji tentang sejarah Jawa adalah buku yang diberinya judul “Sejarah Jawa”.

Di samping itu buku berguru dari Jogja yang ditulis oleh Nasrudin Anshory, seorang budayawan yang sekarang ini mengasuh sebuah pesantren unik di Imogiri, Pesantren Giri. Buku ini merupakan antologi artikel yang ditulis untuk merespon berbagai dinamika social, politik, ekonomi yang dilihat dengan perspektif Jawa atau lebih khususnya Jogja.²⁶

Buku “Ramalan Ramalan Edan Ronggo Warsito”, yang ditulis oleh Otto Susanto, yang secara komprehensif membahas tentang latar belakang Ronggowarsito dan perjalanan spiritual maupun budaya. Di akhir bukunya, Otto Sukanto melampirkan beberapa serat Ronggo Warsito seperti Serat Jaka Lodhang, Kalatidha, Sabdotomo dan Sabda Jati, yang sudah disertai dengan terjemahannya. Buku ini cukup membantu memahami nilai Jawa yang diyakini memiliki nilai adiluhung.²⁷

Setelah dilakukan review terhadap buku-buku, maka dipergunakan untuk membuat instrument yang dipergunakan dalam survaidilakukan Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Guna mendukung presisi terhadap validitas data maka dipergunakan metode *triangle truth*. Dari analisis ini kemudian diperoleh

²⁵ Lihat dalam Otto Susanto, *Ramalan-Ramalan Edan Ronggowarsito*, Yogyakarta, Ronggo Warsito, 2006.

²⁶ Lihat lebih jauh dalam Nasrudin Anshory Ch, Zainal Arifin Thoha, *Berguru Pada Jogja: Demokrasi dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta, Kutub, 2005

²⁷ Otto Sukanto Cr, op.cit.

kesimpulan makna yang sesuai dengan subyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan bagi partai politik

III.4. Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD Kabupaten/Kota Yogyakarta dan DPRD Propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan Sampel dilakukan melalui *stratified random sampling*. Langkah ini diawali dengan penentuan nama-nama calon responden, yang diambil dari unsure aktivis partai politik yang menjadi anggota Dewan ataupun Yang hanya menjadi pengurus partai politik dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD propinsi DIY. Terkumpul sekitar 1000 orang nama-nama calon responden, yang kemudian diambil secara terstatifikasi untuk diperoleh sekitar 200 calon responden.. Dari sekitar 200 questioner yang disampaikan ke responden terdapat sekitar 139 responden yang mengisi dan mengembalikan questioner untuk kemudian diolah.

Dalam pelaksanaan FGD, dilakukan dengan mengundang 30 pengurus partai politik yang memiliki kursi di DPRD tingkat, baik yang sebelumnya menjadi responden dalam survai ataupun yang belum menjadi responden, yang diambil dari pengurus partai politik. Pemilihan ini terkait dengan tujuan untuk mengetahui pemaknaan konflik menurut partai politik, yang dalam survai sebelumnya teridentifikasi memaknai konflik dengan pendekatan instrumentalis. Forum FGD juga dipergunakan untuk mengetahui bagaimana pengurus partai politik dalam beradu argument terhadap kasus-kasus yang ditawarkan, termasuk di dalamnya mengetahui pengetahuan pengurus partai politik yang berada di Yogyakarta terhadap khasanah budaya Jawa dalam kitab-kitab klasik Jawa, dan nilai resolusi konflik yang terkandung di dalamnya.

III.5. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dalam studi dokumentasi naskah-naskah Javanese Wisdom dan penelitian terhadap 6 Partai Politik yang memiliki perwakilan di tingkat kabupaten/kota ataupun propinsi atau yang mampu membentuk fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai

Demokrat. Sebenarnya di Propinsi Jogjakarta terdapat 4 kabupaten dan 1 kota, yakni kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Madya Yogyakarta. Namun hanya 3 kabupaten, yakni Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dan kota madya Yogyakarta.

III. 6. Rancangan penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengikuti rancangan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai resolusi konflik dalam naskah-naskah Jawa; kegiatan ini meliputi; (a) penentuan naskah atau buku-buku (b) mengumpulkan bahan-bahan data naskah atau buku (C) menkonsultasikan makna temuan nilai resolusi konflik berbasis Javanese wisdom kepada para pakar budaya Jawa.
2. Mengidentifikasi pemaknaan nilai resolusi konflik berbasis Javanese Wisdom oleh partai politik; (a) menentukan subyek penelitian (b) menyusun panduan dan pedoman wawancara (c) menyelenggarakan focus group discussion dan (d) melakukan wawancara secara mendalam terhadap partai politik
3. Mengidentifikasi institusionalisasi partai politik sebagai agen resolusi konflik; (a) mengklasifikasi institusionalisasi partai politik sebagai agen resolusi konflik (b) mengkaji makna institusionalisasi partai politik sebagai agen resolusi konflik dengan para ahli
4. Merancang model institusionalisasi nilai resolusi konflik yang berbasiskan Javanese Wisdom kepada partai politik sebagai agen resolusi konflik: (a) merancang model insitusionalisasi resolusi konflik (b) melakukan diskusi terstruktur dalam membuat rancangan model resolusi konflik (c) melakukan ujicoba model tersebut kepada kelompok kecil (d) penyempurnaan model (e) melakukan desiminasi model
5. Menyusun modul untuk institusionalisasi nilai resolusi konflik berbasiskan Javanese Wisdom kepada partai politik sebagai agen resolusi konflik; (a) penyiapan materi modul (b) mengkonsultasikan modul kepada pakar resolusi konflik
6. Uji coba modul dalam forum terbatas yang dilanjutkan dengan revisi (jika diperlukan) dan ujia coba dalam forum yang lebih luas
7. Sosialisasi modul resolusi konflik etnik kepada pengurus partai politik; (a) mengundang partai politik untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif (b) menentukan

jadual pelaksanaan sosialisasi (c) menentukan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi (d) pelaksanaan sosialisasi

BAB IV
DINAMIKA RELEVANSI *JAVANESSE WISDOM*
SEBAGAI NILAI RESOLUSI KONFLIK DALAM PARTAI POLITIK

Dalam bab ini akan dilakukan analisis terhadap nilai *Javanesse Wisdom* sebagai nilai resolusi konflik dalam partai politik. Analisis ini dikembangkan dari analisis yang berbasis data sekunder yakni kajian Kitab-kitab Jawa yang telah dianalisis oleh berbagai penulis, yang kemudian akan diinterpretasi dalam konteks nilai resolusi konflik. Analisis ini diharapkan akan dapat mengartikulasikan ulang, bahwa terdapat sedemikian banyak nilai *Javanesse wisdom*, yang kaya makna dan substantive, yang sangat bermanfaat untuk ditransformasikan kembali sebagai nilai factual bagi proses resolusi konflik dalam partai politik.

Analisis yang berbasis data primer, dipergunakan untuk menganalisis pemaknaan partai politik terhadap nilai *Javanesse wisdom* maupun relevansi nilai *Javanesse wisdom* sebagai instrument bagi resolusi konflik dalam partai politik. Analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana partai politik memaknai konflik secara umum, bagaimana gaya berkonflik dari partai politik, serta bagaimana partai politik memandang *Javanesse wisdom* sebagai salah satu asset yang berharga, yang memiliki relevansi yang tinggi untuk dipergunakan sebagai instrument penyelesaian konflik-konflik politik dalam partai politik.

A. Kitab Yang Membahas Nilai-Nilai Jawa

Dalam khasanah budaya Jawa, terdapat banyak kitab klasik yang menjadi sumber rujukan untuk mendapatkan nilai yang melekat dengan masyarakat Jawa. Beberapa kitab yang mashur, seperti kitab *Sutasoma*, sebuah kitab yang ditulis oleh Mpu Tantular, yang mana diklaim oleh Sukarno sebagai kitab yang menginspirasi nilai kebersamaan dalam perbedaan, *Bhineka Tunggal Ika*. Bahkan nama *Pancasila*, dan nilai-nilai *Pancasila* juga merupakan hasil eksplorasi dari Kitab *Sutasoma*. Kitab *Pararaton*, sebuah kitab yang ditulis oleh Mpu Walmiki, yang mengutarakan seputar kehidupan masyarakat Jawa, yang ditandai dengan bergilirnya beragam kekuasaan, yang kemudian mendapatkan gambaran lebih kongkrit dalam kitab *Negara Kertagama*, yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Dalam

karya Mpu Prapanca inilah, setting tradisi konflik, sedemikian melekat dengan masyarakat Jawa. Tradisi konflik yang berwatak zero sum game, juga terurai dalam kitab Baratayudha, yang ditulis oleh Mpu Sadah dan Mpu Panuluh, yang menggambarkan peperangan besar antara keluarga Barata. Pertempuran ini sedemikian hebatnya, sehingga kelompok Kurawa yang direpresentasikan sebagai “kelompok jahat”, akhirnya harus tersingkir. Masih banyak kitab-kitab lain, semisal kitab Mahabarata, dan Ramayana, yang sangat dipengaruhi oleh kisah-kisah dari India, yang kemudian dalam periode Islam, banyak kitab-kitab klasik Jawa dieksplorasi oleh para pujangga Islam menjadi sebuah tata nilai yang unik. Pujangga Islam semisal Ronggo Warsito dan Sunan Kalajaga, adalah dua pujangga Islam Jawa, yang sedemikian rupa menghadirkan kembali kitab-kitab klasik ke dalam kitab-kitab kontemporer, yang sampai saat ini masih terus dianalisis oleh banyak kalangan.

Ronggo Warsito adalah seorang pujangga Islam dari kraton Surakarta, yang lahir pada hari Senin Legi, tanggal 15 Maret 1802 di desa Yosodipuran Surakarta.²⁸ Dalam silsilah keturunan, Ranggawarsito memiliki nasab yang tersambung dengan Raja Demak Islam, yakni Raden Patah. Ronggowarsito adalah seorang pembelajar sejatinya, yang senantiasa berguru dari pesantren satu ke pesantren lainnya, bahkan dalam analisis Prof. Simuh, Ronggo Warsito sampai melakukan perjalanan intelektualnya ke Bali, untuk mendapatkan pencerahan makna kehidupan²⁹.

Selama hidupnya kurang lebih 47 tahun, Ronggowarsito telah menulis lebih dari 60 karya, baik dalam bentuk kisah, sajak, pantun maupun gubahan-gubahan. Beberapa karya utama dari Ronggo Warsito yang dikategorikan oleh Otto Susanto³⁰ adalah sebagai berikut:

Pertama, *Pustaka Purwo*, sebuah kitab yang menceritakan tentang kesatria dalam lakon Mahabarata. Dalam kitab ini diinformasikan bagaimana keluarga Barata melahirkan dua tradisi yang berbeda, bahkan sangat antagonis. Ada kecenderungan bahwa konflik lebih sering terjadi antar keluarga yang berdekatan dibandingkan dengan basis keluarga yang berjauhan.

²⁸ Lihat lebih jauh dalam R.I Mulyanto, *Biografi Ronggowarsito*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1990, hal. 38

²⁹ Lihat lebih jauh dalam Simuh, *Mistik Islam Kejawen R.Ng. Ronggowarsito*, Jakarta, UI Press, 1988.

³⁰ Lihat dalam Otto Susanto, *Ramalan-Ramalan Edan Ronggowarsito*, Yogyakarta, Ronggo Warsito, 2006.

Kedua, Kalatidha, merupakan kitab yang menceritakan dinamika kehidupan yang silih berganti laksana roda pedati. Kitab Kalatidha ini memiliki perspektif yang relative sama dengan karya Ibnu Khaldun dalam kitab Mukadimmah, yang bertutur bagaimana sebuah peradaban mauoun kekuasaan lahir, tumbuh, berkembang, hancur dan bersiklus terus menerus. Terdapat zaman Kalatidha, Kalasobo maupun Kolo Bendu, jamana keagung, jaman kesejahteraan dan zaman carut marut.

Ketiga, Jaka Lodhang, merupakan kitab yang memberikan road map bagaimana membangun kemakmuran masyarakat. Kerja keras dan berdoa merupakan dua kata kunci untuk mencapai zaman kesejahteraan. Dalam konteks Khaldun, disebut sebagai Madinatul Fadhillah, sebuah jaman kesejahteraan. Dari sinilah bisa difahami bahwa masyarakat Jawa akan mencapai jaman kesejahteraan atau Kolosobo manakala masyarakat Jawa memiliki etos kerja keras.

Keempat, Sabdatomo, sebuah kitab yang menguraikan tentang kebaikan dan keburukan yang bersumber dari perilaku manusia. Buku ini memiliki tata kemiripan dengan analisis perkembangan masyarakat yang didesain oleh Rostow yang bersifat linier, yakni dari masyarakat tradisioonal, pra tinggal landas, tinggal landas, masyarakat dengan kedewasaan, dan akhirnya masyarakat hedonisme. Masyarakat Jawa akan mendapatkan kemakmuran manakala naluri dan sifat kebaikan melekat dalam diri mereka, namun akan menuju kea rah kehancuran manakala sifat tamak dan loba mendominasi.

Sabda jati, merupakan salah satu kitab yang membentangkan nasehat-nasehat maupun ramalan tentang proses menghadapi kematian. Tulisan ini diyakini para sejarawan sebagai tulisan paling akhir dari Ronggo Warsito. Dalam tulisan ini, wajah sufistik dari Ronggowarsito sedemikian mengedepan, kepasrahan maupun kesucian hati menjadi tema sentralnya. Manusia tatkala lahir dalam posisi suci, maka tatkala hendak kembali ke sang Pencipta, maka hendaknya manusia tersebut juga dalam kondisi suci.

Kitab Jawa Kuno yang sekarang ini juga banyak jadi referensi dalam memahami karakter Jawa adalah Serat Darmagandhul. Kitab ini difahami sebagai kitab yang penuh dengan kontroversi maupun mistik di dalamnya. Sehingga dalam upaya memahaminya diperlukan ketenangan dan kesabaran yang ekstra. Serat ini

tidak bisa dibaca secara harafiah, sebab jika hanya dibaca secara harafiah justru akan melahirkan petaka.³¹

Dalam konteks Serat Darmogandhul, terdapat tokoh Sabdo Palon yang menjadi pusat perbincangan. Perbincangan yang unik adalah tatkala harus menempatkan diri atas tradisi luar dari Jawa. Sebagai seorang yang sangat Jawa, Sabdo Palon, yang kemudian sering dinisbahkan sebagai Satrio Piningit, Semar ataupun nama besar lainnya, lebih memilih tetap dengan agama Jawa meskipun Sabdo Palon tahu bahwa agama non Jawa seperti Islam adalah agama yang sangat mulia dan luhur. Perdebatan ini terjadi tatkala Brawijaya akhirnya memilih masuk Islam setelah dilakukan pendekatan intensif oleh Sunan Kalijaga dan Raden Patah. Masuknya Raja Brawijaya sebagai seorang muslim inilah yang kemudian membuat Sabdo Palon kecewa.

Berikut analisis seputar statement Sabdo Palon yang dikaji dalam blog seputar serat Darmogandhul;³²

“Paduka sampun këlajêng këlوروب, karsa dados jawan, irib-iriban, rêmên manut nunut-nunut, tanpa guna kula êmong, kula wirang dhatêng bumi langit, wirang momong tiyang cabluk, kula badhe pados momongan ingkang mripat satunggal, botên rêmên momong paduka. ... Manawi paduka botên pitados, kang kasêbut ing pikêkah Jawi, nama Manik Maya, punika kula, ingkang jasa kawah wedang sanggingiling rêdi rêdi Mahmeru punika sadaya kula, ...”

(“Paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang jawan (kehilangan jawa-nya), kearab-araban, hanya ikut-ikutan, tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol, saya mau mencari asuhan yang bermata satu (*memiliki prinsip/aqidah yang kuat*), tidak senang mengasuh paduka. ... Kalau paduka tidak percaya, yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manik Maya (*Semar*) itu saya, yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya, ...”)

Di samping beberapa kitab klasik yang dipaparkan di atas, terdapat sejumlah buku tentang nalar dan nilai Jawa yang ditulis oleh para budayawan dan sejarawan kontemporer. Beberapa sejarawan Jawa Modern adalah sebagai berikut;

Pertama, Dr. Purwadi. Beliau adalah seorang staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Karya-karya beliau tentang tradisi dan sejarah Jawa sangatlah banyak sekali.

³¹ Terdapat blog yang menjuga mendiskusikan tentang serat Darmo Gandhul ini, untuk lebih jauh lihat blog berikut <http://xendro.wordpress.com/2007/04/12/serat-darmogandhul/> atau dalam <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/serat-darmo-gandhul-proses-islamisasi-nusantara-sebenarnya-t4664/>

³² Ibid.

Tidak kurang dari 20 buku yang membahas tentang seluk beluk Jawa beliau tulis. Salah satu buku fiksi yang mengkaji tentang sejarah Jawa adalah buku yang diberinya judul “Sejarah Jawa”.

Buku ini menguraikan Panji Asmara Bangun, tokoh dalam Serat Panji Asmara Bangun, menggelar kepandaian menggubah tembang, strategi berperang dan berpetualang mencari titisan istri tercintanya. Dalam Serat kuno lain di sebutkan banyaknya cara memutuskan satu perkara hukum yang sangat sukar dirasionalkan, namun sang tokoh secara teliti dan cerdas berhasil menggali dan mengumpulkan bukti lantas memutuskan perkara demi keadilan semua pihak.

Buku ini merupakan kumpulan 14 kitab kuno sastra klasik Jawa yang terdiri dari Serat Purwakandha, Serat pulo Kencana, Serat Panji Asmara Bangun, Serat Nagri Ngurawan, Serat Tawang Gantungan, Serat Niti Praja, Serat Waskithaning Nala, Serat Paniti Sastra, Serat Pamrayoga Utama, Serat Nirata Praketa, Serat Kridhamaya, Serat Niti Sruti, Serat Arjuna Wihaha, dan Serat Tripama. Kitab Jawa ini memuat pitutur yang bijaksana, tidak saja "tentang" kehidupan melainkan juga "dengan" kehidupan kita. Kita seakan di ajak untuk menggeluti khasanah peradaban yang toleran antar sesama, sekaligus mengarungi laut kearifan lokal yang maha penting untuk diserap.

Terjemah dan tafsir dari keempatbelas kitab kuno yang termuat ditujukan bagi kita untuk tetap memandang hidup sebagai mana mestinya. Lumampah anut wirama dan nuting jaman kelakone, tidak bertindak grusa-grusu melainkan secara rasional dan ksatria dalam menjalani kehidupan dunia.³³

Di samping itu terdapat penulis Nasrudin Anshory, seorang budayawan yang sekarang ini mengasuh sebuah pesantren unik di Imogiri, Pesantren Giri. Tidak kurang dari 20 buku yang beliau tulis, dengan gaya tutur yang mengalir sebagaimana tulisan seorang sufi, yang membahas berbagai issue dengan alat teropong kebudayaan. Salah satu buku yang mengurai tentang nilai Jawa adalah Berguru Pada Jogja. Buku ini

³³ Lihat lebih jauh synopsis buku ini dalam bukabuku.com

merupakan antologi artikel yang ditulis untuk merespon berbagai dinamika social, politik, ekonomi yang dilihat dengan perspektif Jawa atau lebih khususnya Jogja.³⁴

Otto Sukanto Cr, seorang penulis yang mencoba membedah berbagai tulisan pujangga Ronggowarsito dalam bukunya “Ramalan Ramalan Edan Ronggo Warsito”, dibahas secara komprehensif tentang latar belakang Ronggowarsito dan perjalanan spiritual maupun budaya. Di akhir bukunya, Otto Sukanto melampirkan beberapa serat Ronggo Warsito seperti Serat Jako Lodhang, Kalatidha, Sabdotomo dan Sabda Jati, yang sudah disertai dengan terjemahannya. Buku ini cukup membantu memahami nilai Jawa yang diyakini memiliki nilai adiluhung.³⁵

Tentang nalar harmoni dalam tradisi, seorang peneliti Moh. Roqib melakukan penelitian tentang dinamika interaksi antara tradisi Jawa dengan tradisi luar. Dalam penelitiannya, simpul-simpul harmoni dalam budaya Jawa tercermin dalam bahasa Jawa, teologi manunggaling kawulo lan gusti, Unggah-ungguh, Kuwalat, Mangan ora Mangan Waton kumpul, Mawa Diri, Pasrah, kerja keras, maupun dalam seni music dan nyanyian Jawa.³⁶

B. Nilai Resolusi Konflik Dalam Naskah Budaya Jawa

1. *Ngluruk Tanpo Bolo*

Terjemahan bahasa Indonesia dari *Ngluruk Tanpo Bolo*, bermakna ketika melakukan konflik harus dilakukan secara kesatria, yakni dengan tidak memperlebar dan merumit konflik yang ada hanya untuk mencapai kemenangan. Tradisi ini banyak tercermin dalam cerita wayang bahwa konflik memang sesuatu yang hadir, atau dalam bahasa wayang adalah “*Goro-Goro*”, yang biasanya dilakonkan tatkala pertunjukan wayang sudah mulai berjalan setengah cerita. Dalam konteks Goro, para kesatria Pandawa, sebagai symbol kesatria yang baik, tatkala melakukan konflik, terutama dengan kalangan kejahatan (biasanya disimbolkan dengan raksasa yang tamak) atau sering disederhanakan dengan figure satria Kurawa, seringkali memilih perang tanding satu lawan satu dengan cara-cara kesatria.

³⁴ Lihat lebih jauh dalam Nasrudin Anshory Ch, Zainal Arifin Thoha, *Berguru Pada Jogja: Demokrasi dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta, Kutub, 2005

³⁵ Otto Sukanto Cr, op.cit.

³⁶ Lihat lebih jauh dalam Moh. Roqib, *Harmoni Dalam Budaya Jawa:Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007

Perang tanding satu lawan satu bisa dimaknai sebagai cara agar konflik tidak terekskalasi menjadi konflik yang lebih luas. Semisal konflik karena memperebutkan senjata sakti, ataupun kesatria perempuan, maka fihak-fihak yang berkonflik akan dibatasi sebagai konflik pribadi dan bukan konflik public. Cara-cara kesatria dimaknai bahwa proses mengalahkan lawan dilakukan secara *fairness*, dengan merujuk kepada aturan main yang telah disepakati bersama. Jika proses memperoleh kemenangan dilakukan secara tidak kesatria, maka kemenangan tersebut dianggap tidak sah dan akan menjatuhkan harkat dan martabat pribadi, keluarga, masyarakat dan kelompoknya.

Makna *ngluruk tanpo bolo* juga bisa difahami sebagai cara konflik yang tidak melakukan politik mobilisasi kekuatan secara penuh dan dengan proses politisasi. Yakni proses konflik dilakukan apa adanya, dengan tidak melakukan upaya menggeser issue konflik, strategi berkonflik, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Masyarakat Jawa yang harmonis mengasumsikan bahwa konflik yang berlarut-larut dan melibatkan banyak fihak justru akan berdampak buruk bagi fihak-fihak yang berkonflik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Proses konflik yang dilakukan dengan cara mempolitisasi sesuatu, yakni mencoba mengkait-kaitkan sesuatu yang sebelumnya tak berhubungan langsung, dan didesain sedemikian rupa seakan-akan berhubungan langsung. Atau konflik yang sebelumnya adalah konflik politik yang berkait erat dengan persoalan ekonomi dan kekuasaan kemudian dijadikan issue konflik moral, agama, sebagai cara untuk mendapatkan legitimasi untuk menjadikan konflik menjadi issue public yang substantive. Cara berkonflik dengan model mobilisasi dan politisasi sangat ditolak dalam nilai *Ngluruk Tanpo Bolo*.

Signifikansi nilai *Ngluruk Tanpo Bolo* sebagai nilai resolusi konflik adalah tidak terjadinya perluasan (ekstensifikasi) maupun kerumitan (intensifikasi) dari konflik. Jika fihak-fihak yang berkonflik menganut nilai ini, maka konflik akan berjalan secara alamiah, dalam arti akan berjalan sesuai dengan aturan main yang disepakati bersama, sehingga konflik akan memicu tradisi berkompetisi secara sehat, tidak destruktif, bahkan menjadi media bagi pembangunan nilai produktivitas.³⁷

³⁷ Seperti disampaikan dalam FGD oleh Suharwanto, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bantul pada 9 Agustus 2009.

2. Menang Tanpo Ngasorake

Terjemahan sederhana dari *Menang Tanpo Ngasorake* adalah memenangkan proses konflik ataupun kompetisi tidak melalui upaya menghinakan fihak yang berhasil dikalahkan. Menang tidak untuk kemenangan diri sendiri, namun justru kemenangan untuk bersama. Fihak yang kalah tidak akan mengalami kerugian massif, demikian pula fihak pemenang tidak mendapatkan keuntungan mutlak.

Dalam seni pewayangan, jika seorang kestria mengalahkan fihak lain, maka ada kecenderungan tidak melahirkan tradisi “kebencian” atau dalam bahasa Jawa diungkapkan dengan istilah “musuh bebuyutan” (musuh selama-lamanya), namun justru akan menjadi kawan karib dan mitra. Fihak yang menang tidak akan mengeksploitasi terhadap fihak yang kalah.

Dalam khasanah konflik, nilai Menang Tanpo Ngasorake memiliki kedekatan makna dengan konsep *non Zero Sum Game*, yakni tidak ada pemenang (*winner*) ataupun Pecundang (*losser*) secara mutlak dalam konflik. Kondisi ini akan menyebabkan fihak-fihak yang berkonflik sejatinya mendapatkan mekanisme baru dalam proses memperebutkan sesuatu secara terlembaga dan jauh dari penggunaan instrument kekerasan, atau yang sering dikenal dengan konsep win-win solution.

Nilai menang tanpo ngasorake adalah sebagai antitesi dari nilai “tumpes kelor”, yakni mengalahkan musuh sekalah-kalahnya, sampai ke akar-akarnya, dengan asumsi fihak lawan adalah representasi orang jahat yang harus dibuang jauh-jauh dari masyarakat. Memang banyak sekali naskah Jawa yang menggambarkan bahwa tradisi konflik ala Ken Arok, yakni konflik yang dilakukan secara berdarah-darah, dan mengalahkan fihak lawan sekalah-kalahnya, dinyatakan sebagai nilai mayoritas. Namun karya Ronggowarsito menunjukkan bahwa nilai itu hanya nilai mayoritas pada era “Kolobendu”, era di mana huru-hara dan kejahatan mendominasi, namun di era “Kolosobo”, di mana ditandai dengan proses pelebagaan nilai-nilai moral menguat, kesejahteraan semakin membaik, maka nilai mayoritas bukanlah tradisi kekerasan namun tradisi dialog.³⁸

³⁸ Lihat lebih jauh dalam Moh Roqib, *Harmoni Dalam Budaya Jawa: Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, atau dalam Nasrudin Anshory Ch, Zainal Arifin Thoha, *Berguru Pada Jogja: Demokrasi dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta, Kutub, 2005, atau Otto Sukanto Cr, *Ramalan-Ramalan Edan Ronggowarsito*, Yogyakarta, Ronggo Warsito, 2006.

Konflik dalam konteks “*menang tanpo ngasorake*”, menjadi sebuah nilai pendulum bagi upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme non kekerasan. Konflik yang menggunakan instrument kekerasan fisik dan tidak dilandasi oleh aturan main yang mapan, biasanya menghasilkan pola konflik *Zero Sum Game*. Prinsip *Menang Tanpo Ngasore*, akan menyebabkan proses penyelesaian konflik tidak semata menggunakan instrument kekerasan, namun juga menggunakan instrument yang lain semisal negosiasi. Pilihan penyelesaian melalui negosiasi menjadikan kemungkinan pihak yang lemah akan cenderung memilih jalur penyelesaian konflik melalui negosiasi, karena diharapkan akan memberikan hasil yang menguntungkan daripada proses penyelesaian melalui kekerasan. Demikian juga bagi pihak yang memiliki kekuatan lebih, pilihan negosiasi juga memungkinkan proses mendapatkan sesuatu dari konflik menjadi lebih cepat dan tidak menimbulkan iritasi bagi pihak yang dikalahkan di kemudian hari. Dalam konteks negosiasi, nilai *menang tanpo ngasoreke* merupakan penjelasan operasional untuk *Mutual Hurting Stalamate*, di mana pihak yang berkonflik lebih memilih jalur negosiasi untuk bisa meminimalisir efek kerugian dari konflik.³⁹

3. *Wani Ngalah Dhuwur Wekasane*

Terjemahan harafiah dari *Wani Ngalah Dhuwur Wekasane* adalah Berani Mengalah, justru Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Sesudahnya. Nilai ini menunjukkan bahwa mengalah bukan berarti kalah, namun justru dengan mengalah menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki kebesaran hati, sebagai sifat dan watak seorang pemenang.

Gambaran nilai ini tercermin dalam tokoh pewayangan dari kesatria Pandawa, Yudistira. Yudistira adalah anak pertama dari Puntadewa yang memiliki watak yang sangat halus. Dari penampakan luar, Yudistira adalah seorang kesatria yang sangat lugu, serta memiliki sikap untuk mengalah terhadap musuh sekalipun. Yudistira juga terkesan tidak memiliki kekuatan ataupun kesaktian, sebagaimana halnya tercermin dalam tokoh Werkudoro, Arjuna, maupun Nakula dan Sadewa.

³⁹ Lihat lebih jauh konsep MHS dalam William Zartman., *Negotiation and Conflict Management*, London, Routledge, 2007, 232.

Namun, dari sisi inilah seorang Yudistira menjadi seorang kesatria pilih tanding dalam konteks perang Baratayudha, antara Pandawa dan Kurawa. Suatu ketika, di penghujung akhir perang Baratayudha, setelah hampir semua kesatria Kurawa meninggal dunia dalam perang, maka ada kesatria sepuh dari Kurawa yang sebelumnya tak mau berperang dengan para Pandawa, namun karena alasan patriotic, maka tampillah Prabu Salya. Seorang kesatria yang memiliki kesaktian sangat luar biasa. Setiap darah prabu Salya keluar, maka akan menjelma prabu-prabu Salya baru dengan kekuatan yang sama. Hampir semua kesatria Pandawa dibuat putus ada, sehingga Kresna membujuk Yudistira untuk maju berperang untuk menghadapi Prabu Salya. Tatkala bertemu dengan Prabu Salya, Yudistira tidak tega melepaskan anak panah ke tubuh Prabu Salya dan justru malah melepaskan anak panah ke arah tanah. Namun justru dengan anak panah yang menyentuh tanah inilah kemudian Yudistira mampu mengalahkan Prabu Salya.⁴⁰

Dalam konteks resolusi konflik, proses penyelesaian masalah justru akan bisa digali manakala ada pihak yang berkonflik mau menurunkan derajat tuntutan atau bahkan mengalah dengan memberikan konsesi bagi pihak lain untuk mendapat mendapatkan konsesi yang lebih. Konsep yang demikian dikenal dengan strategi *Yielding*, di mana pihak yang berkonflik membuka proses negosiasi dengan memberikan kesempatan pihak lain mendapatkan konsesi terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya pembicaraan tentang konflik yang sebelum direpresentasikan dengan penggunaan kekerasan berubah dengan instrument dialog.

Strategi *Yielding* dalam proses negosiasi sedemikian substantif untuk membuka kebuntuan konflik. Strategi *yielding* memang membutuhkan kedewasaan politik dan budaya, sebab ada kecenderungan yang menafsirkan mengalah sebagai bentuk negosiasi yang lembek, yang memungkinkan pihak lawan justru semakin menekan dan meminta konsesi yang tidak proporsional. Seperti halnya pepatah Jawa mengatakan, “*dikhei ati ngrogoh rempelo*”⁴¹ (diberi hati namun malah minta lebih, yakni meminta jantung).

⁴⁰ Lihat lebih jauh dalam seri lakon pewayangan yang juga dututurkan Suharwanto dalam FGD tentang Nilai Jawa dan Resolusi Konflik dalam partai Politik di Yogyakarta, 9 Agustus 2009.

⁴¹ Ungkapan ini menunjukkan bahwa banyak dalam proses konflik, perilaku aktor konflik yang tamak justru menyebabkan konflik akan berlangsung dan akan merugikan banyak pihak, bahkan dalam konteks tertentu berkonflik dan bernegosiasi dengan tamak justru menyebabkan aktor tersebut akan mengalami kerugian yang tak terduga. Lebih jauh gambaran ketamakan dalam negosiasi dalam type negosiasi Lion (tamak) dengan Lambs (Biri-Biri) Joseph T. Banas & Judi Mclean Parks, “Lambs Among Lions? The Impact of Ethical Ideology on Negotiation Behaviors and Outcomes, *International Negotiation* 7, 2002,

Tanpa kedewasaan dan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal, strategi *Yielding* sering dianggap kontraproduktif.

4. *Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono*

Terjemahan harafiah dari *Ngono Yo Ngono Ning Ngono*, begitu ya begitu, namun jangan yang begitu. Nilai ini menggambarkan bahwa dalam konflik hendak melakukan pemilahan secara seksama, mana yang mungkin untuk dilakukan mana yang tidak elok untuk dilakukan. Nilai ini juga mengandung unsure untuk memoderasi konflik, sehingga pilihan berkonflik jangan sampai membuat kedua belah pihak yang berkonflik dalam posisi diametral, hitam putih.

Nilai *Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono*, seringkali tergambar dalam dunia wayang, dalam figur Janoko (Arjuna). Jannako merupakan anak nomor 3 dari putra Pandu Dewanata, yang memiliki watak yang sangat moderat. Bahkan karena kemampuan melakukan komunikasi yang persuasif dengan siapa saja membuat Jannako memiliki hubungan yang sangat erat dengan siapa saja, termasuk di dalamnya adalah perempuan. Dalam konteks wayang, Jannako adalah seorang kesatria yang diidolakan oleh para wanita. Bukan hanya itu, Jannako juga mendapatkan berbagai pengetahuan maupun ilmu kekuatan dari berbagai guru, sehingga Jannako dikenal sebagai seorang kesatria yang rupawan dalam segala hal.

Gambaran sikap untuk melihat konflik secara moderat, merupakan salah satu nilai yang substantif dari resolusi konflik. Kondisi ini memungkinkan dinamika konflik tidak mengarah kepada penggunaan instrument kekerasan dalam konflik, sekaligus memungkinkan peluang penyelesaian konflik dengan menggunakan cara-cara damai seperti negosiasi. Dalam banyak studi konflik, jika dalam masyarakat terdapat sekelompok orang yang memiliki cara pandang yang moderat terhadap konflik, maka proses resolusi konflik akan mampu berjalan dengan baik. Kelompok inilah yang sering

235–260 atau lebih jauh dalam Daniel Druckman and Richard Harris, "Alternative Models of Responsiveness in International Negotiation", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 34, No. 2, (Jun., 1990), Published by: Sage Publications, Inc pp. 234-251

dikenal dengan kelompok Merpati (*Doves*), yakni kelompok yang memberikan apresiasi yang positif terhadap proses penyelesaian konflik secara damai.⁴²

5. *Sing Iso diRembug Yo diRembug lan Ojo Sak Geleme Dhewe*

Terjemahan harafiah dari *Sing Iso Dirembug Yo Dirembug, lan Ojo Sak Geleme Dhewe*, adalah jika ada masalah yang bisa untuk diselesaikan maka segera diselesaikan secara baik-baik, dan jangan semaunya sendiri. Nilai ini sejatinya menggambarkan nilai-nilai agraris masyarakat Jawa, yang sesungguhnya lebih dekat dengan nilai harmoni dibandingkan dengan keinginan berkonflik. Terdapat sebuah cara pandang positif dari masyarakat agraris bahwa semua konflik pada dasarnya bisa diselesaikan secara damai, dengan syarat bahwa pihak-pihak yang berkonflik tidak mengikuti keinginannya sendiri saja.

Dalam tradisi wayang, nalar ini banyak diperankan oleh Punokawan, terutama tokoh Semar. Semar merupakan sosok yang sangat mumpuni dalam mendampingi keluarga Pandawa, yang dalam versi wayang digambarkan bahwa Semar sejatinya adalah seorang Dewa yang secara ikhlas hati untuk mendampingi kiprah para kesatria Pandawa untuk menjalankan misi kebenaran dan rahmat bagi alam. Semar senantiasa menanamkan prinsip bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, sesulit dan serumit apapun masalah jika pihak-pihak yang bermasalah tersebut memegang prinsip untuk keinginan berbagi, dan tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri maka masalah tersebut akan dapat terurai.

Penyelesaian konflik dengan menggunakan kepala dingin, dan hati yang terbuka, “*lembah manah*” akan memungkinkan proses membangun regim negosiasi akan berjalan dengan baik. Dalam studi konflik, regim negosiasi dibangun dari range atau interval dari kepentingan yang akan dipertukarkan dalam proses negosiasi. Dalam membangun range negosiasi yang baik, sangat dibutuhkan peran serta pihak ketiga (*third parties*), sehingga alternatif range negosiasi yang ditawarkan menjadi sangat *favorable* bagi masing-masing pihak yang berkonflik.

⁴² Lihat lebih jauh uraian kelompok Doves dalam Mary B. Anderson & Lara Olson, *Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners*, 2003 The Collaborative for Development Action, Inc. 130 Prospect Street, Suite 202, Cambridge

Dalam studi resolusi konflik, kehadiran fihak ketiga yang kompeten dan memiliki netralitas yang tinggi, berkorelasi positif terhadap proses penyelesaian konflik secara damai. Fihak ketiga memiliki peran yang penting dalam penyelesaian konflik, baik dalam mendesain pre-negosiasi yakni dengan memberikan analisis sebab-sebab konflik secara komprehensif, dan pilihan-pilihan penyelesaian yang menguntungkan masing-masing fihak yang berkonflik, mendesain pelaksanaan negosiasi, sehingga melahirkan regim negosiasi yang bisa dijalankan dan efektif bagi penyelesaian konflik, dan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi hasil negosiasi.⁴³

6. *Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe*

Terjemahan harafiah dari *sepi ing pamrih, rame ing gawe* adalah ketika menjalankan sesuatu terbebas dari keinginan-keinginan individual yang tersembunyi, dan berikhtiar bekerja sebaik-baiknya dan seprofesional mungkin. Nilai ini sejatinya menunjukkan bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat agraris yang kosmopolit, masyarakat yang sangat menghargai kerja keras, pantang menyerah, dan tidak menunjukkan kepentingan pribadi yang malah akan merusak karya tersebut.

Dalam konsep pewayangan, nalar ini dilakonkan dalam pribadi-pribadi para Punokawan, yang mau berkarya dengan sebaik-baiknya demi harapan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Para Punokawan, yakni Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Tokoh Punokawan ini, sering terepresentasi sebagai para abdi (pembantu) Bahkan dalam kalangan Kejawen, memandang bahwa figur Ponokowan sesungguhnya seorang “Kesatria Sejati”, yang merelakan dirinya untuk menjadi “Batur” atau Pembantu demi kebaikan masyarakat.⁴⁴

Dalam konteks negosiasi, nilai *sepi ing pamrih, rame ing gawe*, memiliki relevansi yang tinggi dengan peran seorang mediator, ataupun fihak ketiga. Keterlibatan fihak ketiga tanpa didukung oleh kapasitas dan netralitas, justru menimbulkan beban dan masalah yang malah memperpelik konflik. Problem yang paling serius terkait dengan

⁴³ Lihat lebih jauh dalam Betram I Spector dan I William Zartman, *Post Agreement Negotiation and International Regime: Getting it Done*, Washington, USIP, 2003.

⁴⁴ Dalam lakon wayang terdapat serial Petruk Dadi Ratu, sebuah cerita yang menunjukkan bahwa sesungguhnya para Punokawan ini memiliki kapasitas sebagai elit, namun mereka lebih memilih sebagai abdi agar keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat bisa terjaga.

kehadiran pihak ketiga adalah issue intervensi dan provokasi⁴⁵. Issue intervensi terkait dengan kecenderungan campur tangan pihak lain, yang kemudian akan mengganggu ruang kedaulatan (*souvereignty*) masyarakat yang sedang berkonflik. Banyak kalangan yang berkonflik bahkan memandang lebih baik konflik terus berlangsung tetapi tidak terjadi intervensi terhadap kedaulatan. Problem provokasi terkait dengan peran mediator yang justru menggail di air keruh, otoritas yang dimiliki untuk mendamaikan justru dipergunakan untuk kepentingan transaksional, sehingga konsesi yang harus dibagi antara pihak yang berkonflik, harus juga dibagi dengan pihak mediator. Kehadiran pihak ketika dalam konteks provokator justru akan memperparah dan menyebabkan pola eskalasi konflik menjadi tidak terarah bahkan absurd.

Dalam konteks mediasi, nilai *sepi ing pamrih, rame ing gawe*, sedemikian rupa substantive bagi penyelesaian konflik. Mediator yang mampu menunjukkan kerja profesional dan mengedepankan prinsip netralitas, akan sangat dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik, sehingga saran-nasehat dari mediator tidak diprasangkai secara berlebihan oleh pihak yang bertikai. Road map perdamaian yang dibuat oleh pihak ketigapun biasanya akan diterima dan diimplementasikan. juga

7. *Alon-Alon Waton Klakon*

Terjemahan harafiah dari nilai-nilai *Alon-alon waton klakon*, adalah pelan-pelan asalkan bisa berjalan dan tercapai tujuannya. Nilai ini sering disalah mengerti oleh banyak kalangan dengan menjudge bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat pasif dan tidak memiliki *need for achievement* (n'ach) yang tinggi. Masyarakat Jawa bukanlah masyarakat yang progresif, tetapi masyarakat yang fatalis. Namun sejatinya nilai ini mengandung nilai principal yang unik, bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil dengan baik jika dilakukan dengan instan, proses adalah sebuah keniscayaan, sesuatu tanpa proses sesungguhnya adalah fatamorgana belaka.

Dalam konteks pewayangan, seorang kesatria mendapatkan kapasitas, ilmu dan kesaktian tidak diperoleh secara serta merta, namun harus dilalui melalui proses kerja

⁴⁵ Lihat issue intervensi dan provokasi dalam proses mediasi dalam Mary B. Anderson & Lara Olson, *Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners*, 2003 The Collaborative for Development Action, Inc. 130 Prospect Street, Suite 202, Cambridge bandingkan dengan pola mediasi yang diprakarsai oleh AS terhadap konflik Israel Palestina semenjak tahun 1990-2005, justru malah menyebabkan konflik Israel-Palestina semakin menguat.

keras, ikhtiar, dan doa. Bagaimana seorang Werkudoro sedemikian rupa melakukan kerja keras untuk mendapatkan “air suci”, bagaimana seorang Jannako mendapatkan panah Pasopati juga dengan ikhtiar yang sangat kuat. Sedemikian rupa tergambar dalam pentas wayang, bahwa untuk mendapatkan “*happy ending*” dari sebuah laku kehidupan, seseorang harus mengalami berbagai macam halangan, rintangan cobaan, fitnah, karena dari sinilah berbagai pelajaran berharga seperti kedewasaan, kecerdasan, kearifan akan diperoleh. “*Happy ending*” hanya akan diperoleh setelah terdapat peristiwa “Goro-Goro”⁴⁶.

Dalam konteks seni negosiasi, proses membangun perdamaian merupakan sesuatu yang niscaya. Perdamaian bukanlah sesuatu yang bersifat “*given*” belaka, namun harus dilalui dengan serangkaian aktivitas yang terstruktur, rapi, terencana, dan sistematis. Konflik sejatinya adalah politik untuk saling melukai satu sama lain, konflik adalah politik untuk tidak saling mempercayai legitimasi pihak lain, sedangkan perdamaian adalah politik untuk saling menjaga satu sama lain, politik untuk saling mempercayai pihak lain. Transformasi dari saling melukai dan tidak mempercayai menjadi saling menjaga dan mempercayai adalah sesuatu yang sangat sulit, dan tidak bisa dilakukan dengan prinsip ketergesa-gesaan. Membangun perdamaian memerlukan tradisi menyemai, merawat dan baru memanen tatkala memang sudah benar-benar masak.

Aktivis perdamaian harus memiliki prinsip-prinsip kesabaran dan ketelitian. Kapan harus bertindak, kapan harus diam, kapan harus keras, kapan harus lembut. Masyarakat agraris Jawa sangat faham betul bahwa sebelum memanen sesuatu pasti harus diawali dengan menyemai, menanam dan merawat, maka jika ada orang yang memanen tetapi tidak diawali dengan proses menyemai, menanam dan merawat maka orang tersebut pasti sebagai seorang “pencuri”.

Negosiasi sebagai sebuah proses perdamaian, sangat mempertimbangkan aspek “*ripeness*” (kematangan)⁴⁷. Dalam pandangan Zartman, kematangan dari konflik yang akan ditreatmen dengan penyelesaian damai, berperan penting terhadap kesuksesan negosiasi dan implementasi hasil negosiasi. Pihak ketiga tidak bisa memaksakan

⁴⁶ Dalam konteks pertunjukan wayang, pentas wayang tidak akan ditutup jika belum melewati fase Goro-Goro, tata kehidupan tidak akan mengalami proses keseimbangan kembali sebelum adanya peristiwa Goro-Goro, ataupun cobaan kehidupan.

⁴⁷ Lihat lebih jauh teori kematangan negosiasi dari William Zartman, op.cit, 232

kehendak untuk mempercepat proses pematangan konflik, sehingga proses negosiasi bisa berjalan dengan cepat. Pemaksaan terhadap derajat kematangan konflik, justru menyebabkan iritasi-iritasi yang berlebihan. Sebagaimana analog dalam dunia bisul, bahwa bisul memang bisa dimatangkan melalui perlakuan obat, namun proses peresapan obat ke dalam bisul sendiri juga memerlukan proses. Jika bisul kemudian diberi obat, lalu bisul kemudian dipencet, maka bisul juga tidak akan pecah bahkan akan timbul sakit yang amat sangat.

Apalagi dalam konflik yang bersifat primordialis, konflik yang disebabkan oleh persoalan ikatan nilai, agama, etnis, yang berkecenderungan bersifat hitam putih, memerlukan nilai kesabaran dan kehati-hatian. Kemauan untuk mendengar dan menunggu merupakan dua komponen penting yang harus diperhatikan oleh aktivis perdamaian.⁴⁸

8. *Ing Ngarso Sung Tulodho*

Terjemahan harafiah dari *Ing Ngarso Sung Tulodho*, adalah orang yang berada di depan (menjadi pemimpin), hendaknya memberikan contoh yang baik, karena dalam masyarakat agraris, pemimpin merupakan sumber ketauladan. Pemimpin merupakan perwakilan Tuhan di muka bumi. Nilai ini diperkenalkan ulang oleh Ki Hajar Dewantoro, salah seorang pendiri organisasi Taman Siswa di Yogyakarta, dari khasanah nilai-nilai Jawa.

Dalam tradisi Jawa, pemimpin diasumsikan sebagai representasi kehadiran Tuhan di muka bumi. Pemimpin akan menjalankan tata laku yang penuh dengan kebijaksanaan, bahkan setiap perkataan pemimpin akan menjadi hokum bagi masyarakat sebagaimana ungkapan *Sabdo Pandhitaning Ratu*. Setiap kebijakan pemimpin difahami sebagai amanat dari Sang Maha Pencipta. Pemimpin tidak pernah melakukan perbuatan yang sia-sia, bahkan mensengsarakan rakyat. Jikapun kebijakan pemimpin tersebut sepertinya menyengsarakan masyarakat, maka rakyat harus bersabar, karena dibalik kesengsaraan dan penderitaan tersebut terdapat kebahagiaan.

⁴⁸ Lihat lebih jauh dalam Mary B. Anderson & Lara Olson, *Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners*, 2003 The Collaborative for Development Action, Inc. 130 Prospect Street, Suite 202, Cambridge

Untuk menjadi pemimpin yang baik, para pemimpin telah mengalami dan mendalami berbagai ujian hidup, sehingga setiap langkah dan kebijakannya senantiasa penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dalam konteks pewayangan, pemimpin yang bijaksana ini tergambar dalam tokoh Kresna, seorang yang cerdas dan mampu membaca tanda-tanda zaman. Kresna memiliki senjata yang sangat mashur yang dikenal dengan senjata Cakra, sebuah senjata yang bisa mendinamir perputaran waktu. Ketokohan Kresna ini, menjadi Kresna menjadi seorang penasehat utama Pandawa dalam perang Barata Yudha dengan Kurawa.

Dalam studi konflik terdapat kecenderungan besar bahwa sejatinya konflik lebih sering disebabkan oleh manipulasi dan perilaku elit untuk memperluas kekuasaannya di masyarakat. Konflik justru sebagai instrument bagi elit untuk menunjukkan pada pihak lain bahwa elit tersebut layak mendapatkan kekuasaan lebih dibandingkan dengan elit-elit yang lain. Elit justru menjadi agen konflik, bahkan provocator konflik dibandingkan sebagai agen resolusi konflik. Pendekatan yang menggunakan analisis bahwa konflik lebih disebabkan oleh tarik-menarik kekuatan elit untuk mendapatkan kekuasaan dikenal sebagai pendekatan instrumentalis.⁴⁹

Dalam studi kitab Negara Kertagama sudah tergambar dengan jelas bahwa konflik dalam kekuasaan Tumapel, Singasari, dan Majapahit, lebih disebabkan oleh perilaku elit untuk memperluas kekuasaan. Elit sedemikian rupa mendesaian sesuatu untuk melegalkan terjadinya konflik, yang dari konflik tersebut seorang elit akan mendapatkan kesempatan untuk berkuasa. Gambaran cerita Negara Kertagama juga sangat tercermin dalam konteks konflik politik kekinian, terdapat dugaan besar bahwa konflik etnis di Indonesia semenjak era reformasi justru disebabkan oleh manipulasi dari elit politik local untuk mendapatkan kekuasaan lebih tatkala terjadi kekosongan kekuasaan di daerah semenjak dirilis kebijakan desentralisasi.

Makna terpenting dari nilai *Ing Ngarso Sung Tulodho* menjadi sangat relevan dalam konteks partai politik, di era demokratisasi. Konflik dalam partai politik, berupa perpecahan partai, tidak terlepas dari kompetisi dan intrik dari elit politik partai untuk mendapatkan kekuasaan lebih. Ketidakberadaan keteladanan pemimpin, membuat ruang

⁴⁹ Lihat lebih jauh dalam Lambang Trijono (ed.), *The Making of Ethnic and Religious Conflicts in Southeast Asia: Cases and Resolutions*, Yogyakarta, CSPP, 2005, hal 53-56.

konflik dalam partai politik sedemikian besar. Adalah sangat penting bagi aktor resolusi konflik, untuk membangun keteladanan sebagai modal utama untuk melakukan proses resolusi konflik.

9. *Ing Madyo Mangun Karso*

Secara harafiah, *ing madyo mangun karso*, adalah orang yang berada di tengah harus senantiasa mengembangkan kreativitas dan kekaryaan. Dalam konteks masyarakat Jawa, masyarakat yang berada di tengah sering dilekatkan dengan komunitas birokrasi, maupun para priyayi. Kelompok ini menjadi penghubung yang efektif antara pemimpin dan rakyat, karena kemampuan mengartikulasikan kepentingan dari masyarakat, sekaligus kemampuan mensosialisasikan kebijakan para pemimpin. Kalangan ini memiliki keunikan dalam berbahasa, yang dikenal dengan tata Kromo Madya atau bahasa halus untuk kalangan menengah.

Tradisi ini banyak dieksplorasi oleh Ki Hajar Dewantara, dalam dunia pendidikan membangun kapasitas pendidikan yang lebih baik dari masyarakat Jawa. Dalam konteks trilogi pendidikan, nilai *ing madyo mangun karso*, banyak dijalankan oleh para guru yang berfungsi mentransformasikan ilmu kepada para siswa.

Dalam konteks resolusi konflik, kelompok tengah merupakan dari kelompok moderat. Kelompok yang bisa berfikir secara jernih untuk melihat persoalan konflik yang terjadi. Dalam kelompok inilah inisiasi perdamaian biasanya disemaikan dan ditawarkan, sehingga dalam studi resolusi konflik kelompok ini disebut sebagai kelompok merpati (*doves*).

Peran penting dari kelompok *doves* adalah mentransformasikan ide-ide perdamaian ke berbagai fihak, baik dalam kelompoknya sendiri ataupun kepada fihak lain. Ide dasar yang ditawarkan adalah perdamaian merupakan proses keseimbangan dari fihak-fihak yang berkonflik dan saling membangun kepercayaan satu sama lain. Dengan berkembangnya nilai-nilai moderat dalam masyarakat, maka proses membangun perdamaian sudah dimulai. Semakin besar pengaruh kelompok *doves* dalam masyarakat yang sedang berkonflik akan berkorelasi positif terhadap terbukanya jalan perdamaian. Dengan demikian nilai *ing madyo mangun karso* memiliki peran dalam mentransformasi perdamaian di masyarakat, sehingga tidak berlebihan jika peran transformasi yang sering

dinisbahkan pada guru. Pepatah mengatakan, Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari, atau Guru memiliki *kirotobosobisa* (perpanjangan makna) sebagai *Yang Digugu (ditaati) lan Ditiru (ditaauladani)*.

10. *Tut Wuri Handayani*

Secara harafiah bermakna bahwa para pengikut hanya mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh para pemimpin yang ada di depan. Namun masih ada tambahan kata *Handayani* yang sering dimaknai sebagai kebaikan. Jadi masyarakat akan mengikuti perilaku tokoh masyarakat manakala apa-apa yang disampaikan dan dijalankan tokoh tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan.

Dalam konteks tradisi Jawa, perilaku pemimpin senantiasa difahami sebagai sebuah kebenaran. Perkataan dan tindakan pemimpin senantiasa dalam bingkai kebenaran. Adalah menjadi kewajiban bagi warga masyarakat untuk menjalankan apa-apa yang dikehendaki pemimpin, karena menjalankan perintah pemimpin adalah sebuah ibadah. Pemimpin dan masyarakat akhirnya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, atau yang dikenal dengan istilah *manunggaling kawulo lan gusti*.

Dalam konteks studi resolusi konflik, kondisi masyarakat yang berwatak paternalistic seperti halnya masyarakat Jawa, sesungguhnya rentan untuk direkayasa oleh elit untuk memobilisasi masyarakat untuk kepentingan elit. Elit yang difahami sebagai figur yang diterima tanpa *reserve*, memberikan ruang yang besar bagi terbentuknya politisasi kebenaran dalam bentuk politisasi agama maupun budaya. Politik modern memang memberikan gambaran yang lebih kritis dan rasional, bahwa bentuk-bentuk kultus dan absolutism seringkali hanya melekat pada pemimpin. Sejatinnya proses pengkultusan tersebut secara sengaja didesain untuk senantiasa mempertahankan legitimasi kekuasaan atas masyarakat.

Namun, nilai *Tut Wuri Handayani*, jika dibaca secara mendalam sesungguhnya bukan merepresentasikan absolutisme. Pemimpin tidak selamanya sebagai kelompok masyarakat yang tak punya dosa, pemimpin bisa salah, atau sengaja berbuat salah. Sehingga pilihan kata *handayani*, sebagai katup pengaman. Sebagaimana dalam tradisi Islam mencerminkan bahwa ketaatan pada pemimpin memang sebuah kewajiban, namun

tak ada kewajiban taat kepada pemimpin manakala pemimpin tersebut memerintahkan kepada keburukan (*laa tha'ah fii ma'syiyah*).

Nilai ini sejatinya dapat dipergunakan sebagai dasar bangunan masyarakat yang kritis terhadap perilaku dan kebijakan pemimpin. Masyarakat akan menjadi “pengadil” sejati bagi perilaku masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki daya kritis yang tinggi, upaya pemimpin untuk menciptakan konflik dengan masyarakat lain (politik kambing hitam) sebagai sarana meningkatkan kekuasaan atas masyarakat, sedikit banyak akan berkurang. Pemimpin tidak bisa bermain api sebagai sarana mendapatkan kekuasaan, karena justru dengan pemimpin yang suka bermain api maka legitimasi kepemimpinan atas masyarakat akan berkurang bahkan diambil paksa oleh masyarakat.

C. Pemahaman Partai Politik terhadap Konflik dan Resolusi Konflik

Dalam literature yang ditulis oleh Robinson, muncul adanya tiga pandangan terhadap konflik. Pandangan pertama menyatakan bahwa konflik adalah suatu hal yang negative dan destruktif sehingga konflik harus dihindari. Kedua, konflik adalah suatu hal yang wajar sebagai suatu fenomena hubungan sosial sehingga konflik harus dihadapi. Dan ketiga, konflik adalah suatu hal yang positif bagi perubahan sosial sehingga konflik seringkali harus dimunculkan. Pandangan-pandangan inilah yang kemudian digali lebih dalam terhadap Parpol dalam melihat konflik.

Secara umum, partai politik melihat konflik sebagai suatu fenomena yang biasa. Sebesar 40 % responden menyatakan bahwa konflik adalah suatu hal yang biasa. Biasa dalam pengertian bahwa memang menjadi salah satu karakteristik bagi parpol bahwa berkonflik adalah bagian dari tugas mereka dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat. Di dalam parpol sendiri tidak jarang di antara para kandidat pimpinan Parpol harus berkonflik untuk menduduki suatu jabatan dalam Parpol seperti ketua umum atau calon anggota legislative dari parpol bersangkutan. Bahkan konflik internal partai lebih dahsyat eskalasinya dan dampaknya daripada konflik antar parpol.⁵⁰

Suatu fenomena yang cukup menarik adalah pandangan responden sebanyak 33 % yang menilai bahwa konflik politik yang bereskalasi menjadi kekerasan tidaklah berguna.

⁵⁰ Keterangan ini disampaikan oleh Suharwanto selaku ketua DPD PAN Kabupaten Bantul dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2009.

Bersumber dari dua hal tersebut, yaitu konflik adalah suatu hal yang biasa dan konflik kekerasan tidak berguna, maka kami bisa berkesimpulan bahwa konflik di mata parpol adalah suatu fenomena hubungan sosial sekaligus suatu hal yang positif. Dalam pandangan konflik sebagai suatu fenomena sosial mengharuskan pimpinan parpol memiliki kemampuan mengelola konflik dengan baik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh John Keban dari Partai Golkar yang menyatakan bahwa untuk menjadi pimpinan Parpol harus dapat mengelola konflik.⁵¹ Sementara itu, dalam perspektif konflik suatu hal yang positif menjadikan seorang pemimpin parpol seringkali menciptakan konflik untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Konflik yang diciptakan ini seharusnya masih dalam taraf yang bisa dikendalikan sehingga tidak bereskalasi menjadi kekerasan.

Beranjak dari pandangan parpol tentang konflik tersebut diatas, hal lainnya yang kemudian harus kita gali adalah bagaimana intensitas keterlibatan seseorang dalam berkonflik dan gaya berkonflik dari parpol. Secara umum, seseorang akan dihadapkan pada lima pilihan taktik berkonflik, yaitu menghindar, akomodasi, kompromi, kompetisi/konfrontasi, dan kolaborasi. Pilihan taktik mana yang akan diambil oleh seseorang akan sangat tergantung pada budaya yang melekat pada diri si aktor dan isu apa yang dia hadapi dalam berkonflik.⁵²

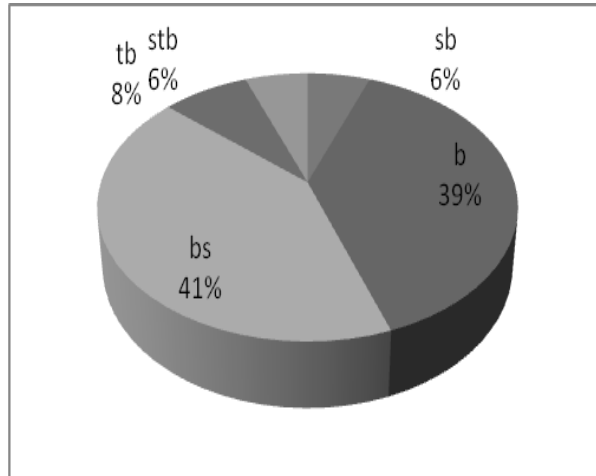
Masyarakat Jawa, biasanya dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni social sehingga cenderung memandang konflik sebagai aib, yang harus dikelola dengan hati-hati dalam bentuk konflik yang tersembunyi atau laten. Namun dari diagram berikut tercermin sebuah transformasi besar. Ada sekitar 45% responden menyatakan bahwa konflik sebagai sesuatu yang bermanfaat, bahkan ada sekitar 41% responden yang tidak alergi terhadap keberadaan konflik. Hanya sekitar 14% responden saja yang melihat konflik sebagai sesuatu yang traumatik.

⁵¹ Dikutip dari hasil FGD diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2009.

⁵² Hocker & Willmot, *Interpersonal Conflit*, 2004

Diagram 1

Kebergunaan Konflik Dalam Partai Politik



Sumber: Data Primer

Apakah cara pandang partai politik ini mewakili perubahan cara pandang masyarakat Yogyakarta pada umumnya? Dalam pandangan Nasrudin Anshari dan Zainal Arifin Toha, sebagai budayawan Yogyakarta, memang ada perubahan cara pandang masyarakat Yogyakarta terhadap dinamika globalisasi, dan hadirnya multikultural di Yogyakarta, sebagai implikasi sebagai kota pendidikan dan budaya. Namun perubahan tersebut tidak serta merta merubah secara substansial orang Jawa yang Jawani.⁵³ Masyarakat Jogja masih dikenal sebagai masyarakat yang tatkala berkonflikpun ditata sedemikian rupa sehingga tidak vulgar. Bahkan cara berdemokrasi sebagai mekanisme berkonflik secara sehatpun, masyarakat Yogyakarta memiliki makna tersendiri. Demokrasi memang sebagai sebuah keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat Yogyakarta, namun masyarakat Yogyakarta tidak akan hanyut (keli) dengan demokrasi yang mencerabut nilai-nilai yang Jawani.⁵⁴

Namun bagi aktivis dan pengurus partai politik, konflik merupakan makanan sehari-hari dalam politik. Justru dengan terjadinya konflik maka seseorang bisa lebih dewasa bahkan dapat memperoleh posisi yang tinggi dalam masyarakat. Seorang yang memiliki kreativitas dalam konflik, sesungguhnya adalah seorang pemimpin politik

⁵³ Lihat lebih jauh dalam Berguru pada Jogja

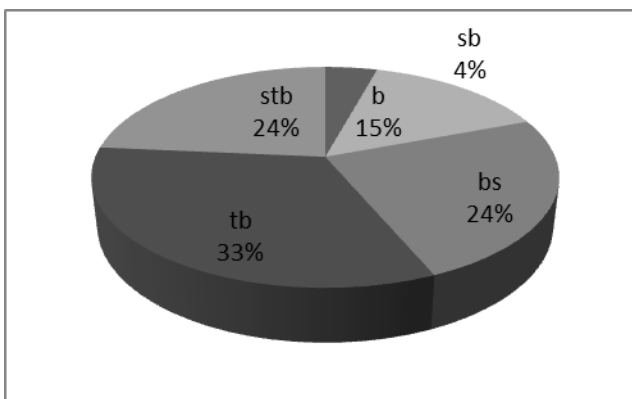
⁵⁴ Ibid.

sejati. Ungkapan ini banyak disampaikan oleh para peserta FGD yang cenderung melihat konflik sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi karier politik seseorang dalam partai politik pada khususnya.

Bagaimana jika konflik berekskalasi menjadi konflik terbuka, bahkan menggunakan instrument kekerasan. Kalangan aktivis partai politik yang sebelumnya sangat ramah dengan konflik ternyata menyatakan ketidakramahan terhadap konflik yang menggunakan instrument kekerasan.

Diagram 2

Konflik yang berekskalasi menjadi konflik terbuka



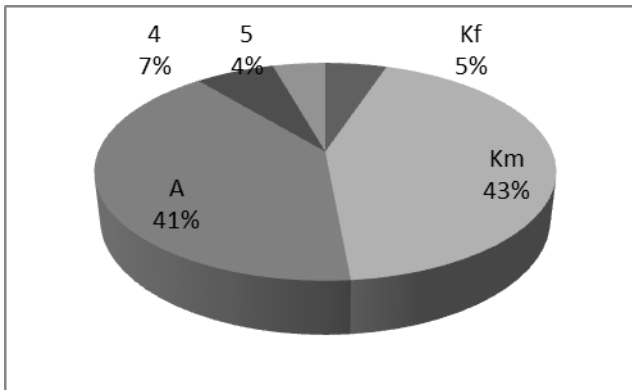
Sumber: Data Primer

Diagram di atas menunjukkan, ada sekitar 57% responden menyatakan bahwa konflik yang berekskalasi menjadi konflik yang beraroma kekerasan, sebagai hal yang mubazir dan tidak berguna. Namun masih ada sekitar 24% yang menganggap konflik menjadi fenomena kekerasan sebagai sesuatu yang biasa saja dan tidak perlu dikhawatirkan, bahkan masih ada sekitar 19 yang menyatakan masih berguna. Artinya ada sekitar 43% responden menyatakan bahwa berekskalasinya konflik dalam bentuk kekerasan adalah sebagai hal yang niscaya. Bahkan dalam FGD juga terungkap bahwa ada kecenderungan elit politik partai politik yang menduduki posisi tinggi dalam struktur partai politik berkecenderungan memiliki jaringan dan kekuatan laskar sipil. Semakin elit terlibat dalam pengorganisasian lascar sipil, semakin besar pula peluang elit tersebut untuk tetap eksis.⁵⁵

⁵⁵ Responden meminta untuk tidak disebutkan identitas orang dan partainya, bahwa fenomena ini masih bertahan bahkan setelah masa reformasi.

Dari sini bisa difahami bahwa ada kecenderungan paradigm yang dipakai para aktivis partai politik dalam berkonflik adalah paradigm instrumentalis. Konflik difahami sebagai alat yang efektif untuk mencapai kekuasaan. Namun, pola aktivis partai politik menjadi pengusaha kekerasan (*violence entrepreneur*) ada kecenderungan semakin lama semakin berkurang. Konflik yang menggunakan nir kekerasan dianggap lebih Jawani.

Diagram 3
Gaya dalam Berkonflik

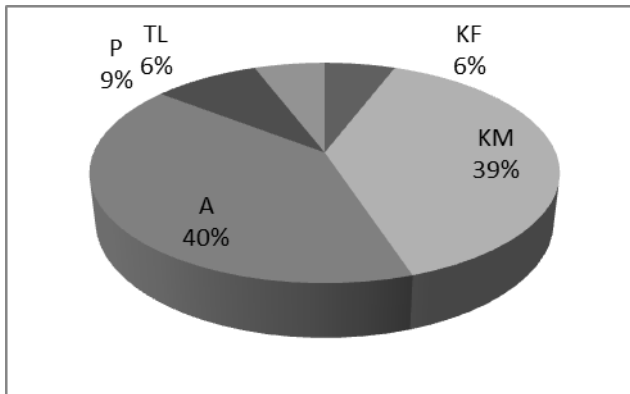


Sumber: Data Primer

Sebagian besar responden dari partai politik yang pernah melakukan konflik dengan pihak lain cenderung menggunakan gaya kompromi (43%) maupun gaya akomodatif (41%). Gaya kompromi sendiri difahami sebagai gaya untuk memoderatkan kepentingan satu sama lain, sedangkan gaya akomodatif difahami sebagai gaya untuk bersikap cair atau mengalah. Sehingga dalam batas tertentu, sebagian besar responden dari partai politik cenderung menerapkan tata nilai *Ngono Yo Ngono, Ning Ojo Ngono, Sing Iso Dirembug Yo Dirembug, Lan Ojo Sak Geleme Dhewe*. Tradisi untuk berkonflik dengan gaya “tumpes kelor” atau konfrontatif. Data ini juga mendukung pernyataan para peserta FGD yang menyatakan bahwa tradisi konfrontatif dalam politik di Jogja bukanlah gaya yang elok, malah akan menjadi kontraproduktif. Dengan pilihan gaya akomodatif dan kompromistik diharapkan akan mendapatkan respon publik dengan baik, dan tercapai kepentingan yang diperjuangkannya.

Diagram 4

Gaya Berkonflik Yang Melibatkan Partai Politik



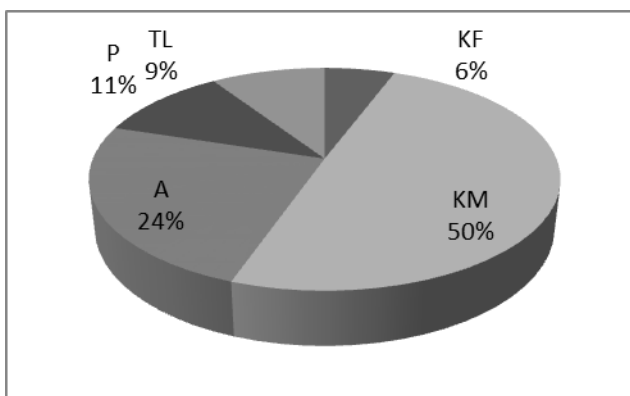
Sumber: Data Primer

Pilihan gaya berkonflik untuk mengedepankan gaya kompromi dan akomodatif ternyata juga masih dominan, dibandingkan dengan gaya konfrontatif maupun pasif, dalam urusan-urusan partai politik. Sehingga ketika terjadi konflik partai politik di tingkat pusat yang kemudian berimbas ke tingkat daerah dan cabang ternyata tidak menimbulkan huru-hara dan kekerasan. Semisal ketika PKB mengalami perpecahan dari PKB Gur Dur dengan PKB Matori, atau PKB Gus Dur dengan PKB Alwi Shihab-Saefullah Yusuf, ataupun PKB Gus Dur dan PKB Muhaimin akhir-akhir ini tidak menyebabkan konflik kekerasan. Hal ini juga terjadi dalam partai nasional, semisal PDP (Partai Demokrasi Pembaharuan) yang memisahkan diri dari PDIP, di akar rumput juga tidak menimbulkan kekerasan yang berarti. Dari diagram di atas, hanya sekitar 6% dari responden yang memilih gaya konfrontasi. Artinya, partai politik di Yogyakarta masih sangat menghormati tradisi lokal, yang lebih mengedepankan nilai Alon-alon Waton Klakon, wani Ngalah Dhuwur Wekasane dalam berkonflik dalam internal partai politik.

Lantas bagaimana jika konflik yang terjadi adalah konflik lintas partai. Bagaimanakah gaya berkonflik? Dalam diagram berikut akan tergambar bagaimana aktivis partai politik memandang gaya konflik terhadap partai yang lain.

Diagram 5

Gaya Berkonflik Terhadap partai Lain



Sumber: Data Primer

Terdapat kecenderungan bahwa gaya berkonflik aktivis partai politik di Yogyakarta terhadap partai yang lain relative sama dengan konflik dengan partai sendiri. Yang sedikit berbeda hanyalah pilihan pasif, di mana jika terjadi konflik dengan partai sendiri pilihan pasif hanya sekitar 9% namun jika dengan partai lain naik sedikitnya menjadi sekitar 11%. Kondisi ini bisa dibaca bahwa aktivis partai politik cenderung tidak mau termobilisasi berkonflik dengan partai yang lain tatkala tidak langsung menyangkut kepentingannya.

Kuatnya gaya akomodasi dan kompromi, juga bisa dijelaskan dari sisi issue konflik yang mengemuka. Issue panas yang terkait dengan politik di Yogyakarta, khususnya dalam konteks politik di Propinsi sesungguhnya hampir tidak ada. Posisi elit politik Gubernur, yang selama ini sekaligus berposisi sebagai Raja, difahami sebagai ruang yang sacral untuk diutak-atik menjadi issue politik. Hampir semua partai politik di Yogyakarta tidak secara artikulatif untuk mempersoalkannya.⁵⁶ Pada sisi yang lain, Yogyakarta bukanlah propinsi yang “basah”, sehingga konflik partai politik yang terkait dengan pengelolaan investasi tidak mengemuka seperti halnya di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Artinya, kue yang diperebutkan tidaklah banyak, sehingga perebutan kue kekuasaanpun menjadi lebih bersifat flat dan tidak terjadi pola “*fighting*”. Maka bisa difahami manakala gaya konfrontasi tidak banyak dipilih karena justru akan merugikan diri sendiri, yang malah bisa terstigma sebagai aktivis politik yang tidak kenal tempat dan arena (*ra kenal gon lan papan*).

⁵⁶ Pada tahun 2004, sesungguhnya sudah ada dinamika politik untuk formulasi transisi kepemimpinan yang tidak berbasis penetapan, tapi pemilihan. Hanya PPP saja yang berani mengajukan calon, sedangkan partai yang lain cenderung tiarap karena alasan sungkan dan tidak pada tempatnya.

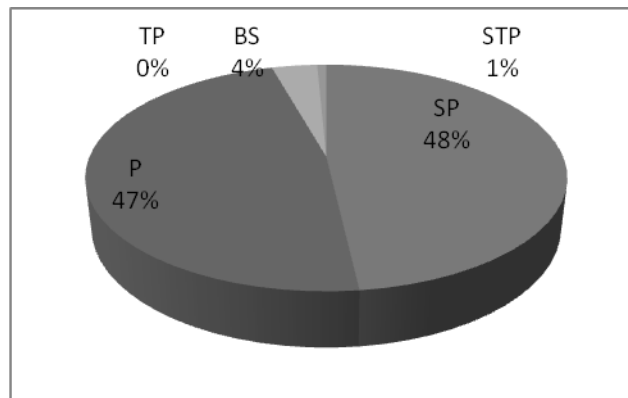
D. Model Penyelesaian Konflik

1. Model Dialog

Model penyelesaian konflik politik melalui media dialog dalam pandangan responden sedemikian rupa penting yang tercermin dari lebih dari 95% responden persetujuannya. Dalam konteks ini bisa dimaknai bahwa politik di Yogyakarta lebih difahami sebagai politik harmoni dibandingkan konflik. Hal ini juga terdukung dalam pelaksanaan FGD, semua peserta FGD menyatakan model penyelesaian konflik melalui dialog adalah model yang paling idial, sebagaimana nilai *Nek Ono Rembug Yo dirembug, lan ojo Sak Geleme Dhewe*.⁵⁷

Diagram 6

Model Penyelesaian Konflik Melalui Jalan Dialog



Sumber: Data Primer

Bahkan seorang politisi Golkar Yogyakarta yang berasal dari Flores menyatakan bahwa tatkala ia perpolitik dengan menggunakan nilai Jawa, maka ia merasa senantiasa

⁵⁷ Hal ini dikemukakan oleh Suharwanto, John Keban, maupun Agus dalam FGD yang dilaksanakan 9 Agustus 2009.

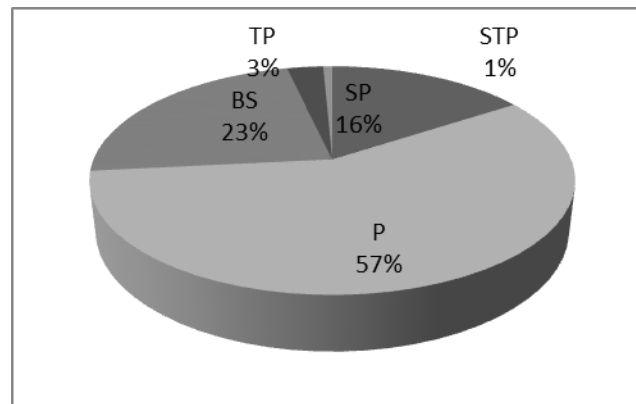
kompetitif dalam bersaing dengan partai politik selain Golkar, maupun kader muda Golkar lainnya. Nilai Nek Ono Rembug Yo Dirembug, Lan Ojo Sak Geleme Dhewe, dalam pandangan John Kaban sangat tercermin dalam dialektika perundangan-undangan keistimewaan Jogja yang membuat banyak pihak ingin menggunakan jalur non dialog, namun akhirnya banyak politisi di Jogja dalam merespon UU Keistimewaan lebih memilih cara dialog daripada kekerasan.

2. Proses Politik

Dalam konteks penyelesaian politik melalui proses politik dimaknai sebagai penyelesaian dengan menggunakan cara-cara damai dengan mempertimbangkan derajat representasi dalam politik. Semakin partai politik menempati posisi representasi yang kuat di mata public, maka partai politik tersebut memiliki otoritas yang lebih. Terdapat sekitar 67% responden yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik melalui proses politik sangat penting, namun ada sekitar 23% responden menyatakan biasa-biasanya. Bahkan ada sekitar 4% menyatakan tidak penting.

Diagram 7

Model Penyelesaian Konflik melalui proses politik



Sumber: data Primer

Banyaknya responden yang menyatakan kekecewaan proses penyelesaian politik melalui proses politik, lebih disebabkan oleh fenomena bahwa proses politik dimaknai dalam makna minor yakni politik dagang sapi atau transaksional, yang terkadang

kemudian tidak mencerminkan kepentingan public. Partai politik hanya menjadi arena dagang sapi. Pernyataan ini disampaikan dari anggota DPC PPP Sleman, bahwa banyak proses politik di Parlemen seringkali mencederai hati nurani masyarakat karena dominannya proses politik yang tidak berbasiskan kepentingan masyarakat.

Namun, mayoritas responden responden sekitar 72% menyatakan bahwa penyelesaian politik dalam konteks partai politik adalah sesuatu yang lumrah. Partai politik yang memiliki representasi yang besar dalam politik, akan memiliki peluang yang besar untuk mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk produk-produk politik. Perkara politik bukanlah semata-mata perkara, elok tidak elok, ataupun ukuran normative lainnya. Pernyataan demikian banyak disampaikan oleh partai politik yang memiliki kursi besar di propinsi DIY, seperti PAN, ataupun Golkar.⁵⁸

3. Hukum

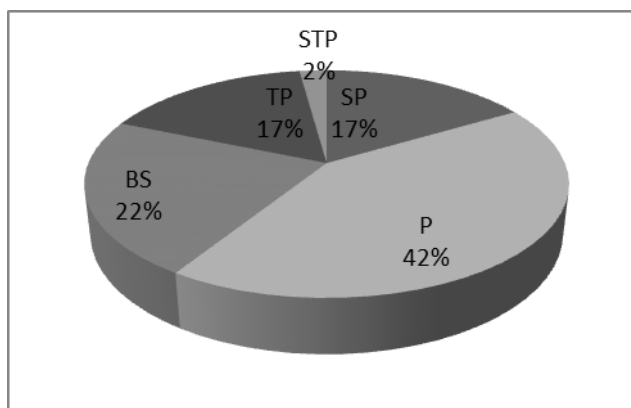
Proses penyelesaian konflik politik melalui mekanisme hukum seringkali tidak populer terjadi di antara partai politik. Konflik politik biasanya diselesaikan melalui proses politik, baik dengan melakukan lobi-lobi politik ataupun dengan tekanan politik agar aspirasi dan kepentingan politiknya bisa difahami dan diterima oleh kelompok yang lain.

Diagram berikut menunjukkan pola yang agak berbeda, karena hamper sekitar 59% menyakini bahwa penyelesaian politik melalui mekanisme aturan legal formal sedemikian penting. Argumentasi besar pentingnya penyelesaian politik melalui mekanisme hukum hukum, bahwa penyelesaian melalui mekanisme hukum memiliki legalitas yang tinggi dibandingkan dengan mekanisme politik yang seringkali bersifat cair. Issue seputar penetapan calon terpilih dalam proses politik terkait dengan sengketa pemilihan atau selisih suara, ataupun issue korupsi yang dialamatkan ke partai politik, seringkali membutuhkan penyelesaian secara hukum agar terdapat keputusan tetap dan mengikat.

Diagram 8

Model Proses Penyelesaian Konflik Melalui Hukum

⁵⁸ PDIP, Demokrat dan PKS, dalam forum FGD tidak bisa hadir karena alasan teknis.



Sumber: Data Primer

Hanya ada sekitar 19% responden, yang tidak sepakat bahwa penyelesaian konflik politik diselesaikan melalui mekanisme hukum. Pandangan ini didasarkan kepada logika politik dan hukum sebagai sesuatu yang berbeda. Regim politik dianggap sebagai representasi regim hukum. Penyelesaian politik melalui mekanisme hukum seringkali dianggap tidak adil. Persoalan politik adalah persoalan yang bisa ditawar, dan tidak harus menang kalah. Sedangkan penyelesaian secara hukum akan berwatak zero sum game, ada yang kalah mutlak dan ada yang menang mutlak. Proses penyelesaian melalui mekanisme hukum seringkali dipilih sebagai pilihan terakhir, manakala penyelesaian secara politik mengalami jalan buntu, sehingga membutuhkan proses arbitrase.

Dalam konteks kasus politik terkait dengan keberadaan UU Keistimewaan, sampai saat ini masih mengalami *deadlock*, sehingga masing-masing pihak masih terus melakukan “upaya” politik, sebelum produk hukum yang mengikat disahkan. Apa gunanya produk hukum segera keluar, namun malah justru merugikan komunitas politik di Yogyakarta. Pernyataan ini banyak disampaikan oleh peserta FGD dalam membahas diskursus politik keistimewaan di Yogyakarta.

Sedangkan ada sekitar 22% responden menganggap bahwa proses penyelesaian politik melalui mekanisme hukum merupakan sesuatu yang wajar. Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*), bukan sebagai Negara kekuasaan (*machtstaat*). Jika memang mekanisme hukum dianggap lebih baik daripada penyelesaian politik maka pilihan melalui mekanisme hukum akan dipilih, demikian juga sebaliknya, jika mekanisme politik dianggap lebih baik maka penyelesaian konflik politik akan mempergunakan mekanisme politik.

4. Personal

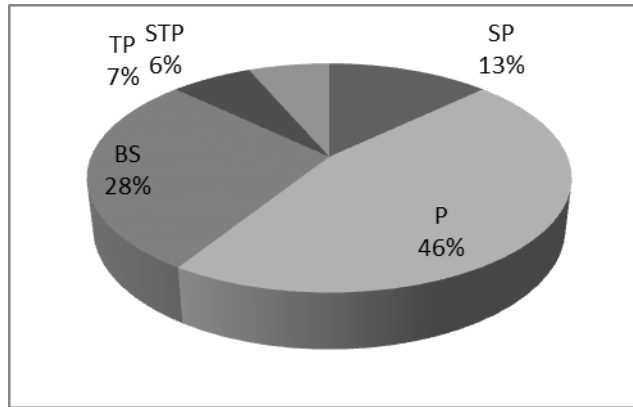
Penyelesaian konflik politik melalui mekanisme personal difahami sebagai bentuk penyelesaian politik melalui pendekatan interpersonal atau antar pribadi. Issue kelekatan dan koneksitas digunakan untuk membangun kepercayaan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan bagi penyelesaian masalah. Terdapat sekitar 59% responden yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik politik melalui mekanisme personal, angka ini sama dengan penyelesaian politik melalui mekanisme hukum. Argumen dasar yang mendasari pentingnya penyelesaian politik melalui pendekatan personal adalah ada kecenderungan konflik politik lebih banyak disebabkan mis-komunikasi dan mis-persepsi. Politik adalah komunikasi. Konflik politik difahami ditimbulkan oleh banyaknya distorsi pesan, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh aktor-aktor politik.

Konflik politik adalah sesuatu yang sangat lentur, kadang mengeras, kadang melunak. Konflik politik tidak bisa kemudian dibawa ke arah konflik yang bersifat hitam putih dan ideologis. Konflik politik sebagai sesuatu yang bisa dipertukarkan satu sama lain. Dengan demikian, kemampuan melakukan komunikasi informal melalui pendekatan personal diharapkan akan bisa mengurangi distorsi pesan, sehingga akan memungkinkan persoalan politik tersebut bisa dinegosiasikan ulang.

Namun, ada sekitar 13% yang menyatakan bahwa penyelesaian politik melalui mekanisme personal adalah sesuatu yang absurd dan rentan dengan korupsi politik. Penyelesaian melalui mekanisme personal dianggap menyederhanakan masalah, dan cenderung dimanipulasi oleh kelompok-kelompok elit tertentu, yang dikhawatirkan justru akan merusak penyelesaian politik.

Diagram 9

Model Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Personal



Sumber: Data Primer

Namun ada sekitar 28% responden menyatakan penyelesaian politik melalui mekanisme personal sebagai sesuatu yang biasa. Persentasenya lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian hukum, yang kemudian bisa dimaknai bahwa penyelesaian konflik politik melalui mekanisme personal dianggap sebagai kewajaran politik. Argumentasi dasar dari pandangan ini adalah penyelesaian konflik politik seringkali menemui kebuntuan atau *deadlock*, pendekatan personal justru diyakini akan bisa mengurai kebuntuan-kebuntuan politik, sehingga proses penyelesaian konflik politik bisa dilakukan dengan baik. Pendekatan personal juga dianggap penting sebelum dikeluarkan keputusan hukum yang mengikat, karena dengan pendekatan personal tersebut keputusan-keputusan hukum yang bersifat hitam putih, bisa dinegosiasikan terlebih dahulu.

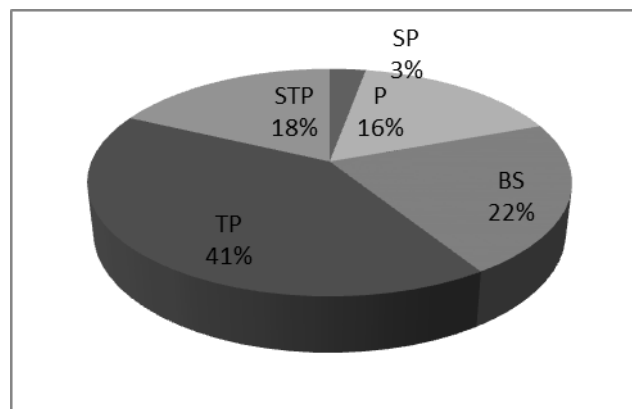
5. Kekuasaan

Proses penyelesaian politik dengan menggunakan mekanisme kekuasaan difahami sebagai bentuk penyelesaian politik dengan menggunakan instrument kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu aktor. Sehingga pola penyelesaian berbentuk satu arah, dari pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan lebih. Dalam diagram berikut menunjukkan bahwa hanya ada sekitar 19% responden yang sepatutnya dengan model penyelesaian politik dengan basis kekuasaan. Argumen dasar dari pandangan kelompok ini adalah penyelesaian melalui pendekatan kekuasaan tidak selamanya buruk. Pada issue-issue tertentu pendekatan kekuasaan penting untuk mencegah tidak terjadinya eskalasi konflik sebagai akibat terjadinya kekosongan otoritas. Kekerasan justru akan semakin membesar jika aktor-aktor politik yang berkonflik justru memanfaatkan kekosongan otoritas tersebut sebagai mekanisme untuk mendapatkan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan juga tidak bisa digeneralisir sebagai pendekatan otoriter dan

militeristik. Demokrasi sejatinya juga memberikan ruang yang longgar bagi kekuatan politik yang berkuasa untuk membawa masyarakat ke sebuah titik. Sepanjang dilakukan secara fairness dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan maka pendekatan kekuasaan adalah sah-sah saja dalam politik.

Diagram 10

Model Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Kekuasaan



Sumber: Data Primer

Berbeda dengan kelompok yang bisa menerima pendekatan kekuasaan, terdapat 59% responden yang menyatakan ketidaksepatannya terhadap penyelesaian konflik politik melalui pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan digeneralisir dengan pendekatan kekerasan dan tidak demokratis, sehingga sering diidentikkan dengan pendekatan “Orde Baru”.⁵⁹ Argumen dasar dari penolakan terhadap penyelesaian konflik melalui mekanisme kekuasaan berangkat dari asumsi besar bahwa pendekatan kekuasaan akan menyebabkan distorsi konflik, yang kemudian berujung kepada distorsi masalah dari konflik. Konflik dalam konteks permukaan sepertinya mengalami de-eskalasi, namun sebaliknya di tingkat tertentu justru mengalami eskalasi yang bisa jadi tidak terukur. Konflik yang bersifat latent dalam batas tertentu malah lebih berbahaya dibandingkan dengan konflik yang bersifat manifest. Yang paling berbahaya dari

⁵⁹ Istilah ini sering muncul dalam perdebatan politik. Sehingga membuat banyak kalangan merasa teriritasi jika dihubung-hubungkan dengan Orde Baru, meskipun sejatinya pendekatan kekuasaan tidak bisa diidentikkan dengan Orde Baru semata. Debat ini juga muncul dalam FGD yang dilaksanakan pada 9 Agustus 2009, meskipun tidak terlalu intens.

pemeliharaan konflik latent adalah aktivitas manipulative untuk mempertahankan legitimasi suatu regim. Atas nama bahaya laten, maka segala bentuk tindakan diskriminatif menjadi bisa dimengerti bahkan legal. Semakin banyak persoalan dilatenkan, sesungguhnya sebagai bentuk dari upaya melanggengkan masalah, dan melanggengkan kekuasaan itu sendiri.

Adapun 22% responden yang menyatakan pandangan bahwa pendekatan kekuasaan dalam penyelesaian politik sebagai hal yang wajar dibangun dari argument bahwa politik adalah kekuasaan. Pada titik tertentu, politik harus difahami sebagai kekuasaan *ansich*, sebagaimana pendekatan realis. Siapa yang kuat siapa yang berkuasa, siapa yang bisa memanipulasi dialah yang berkuasa. Perkaranya bukan pada persoalan tidak bermoral atau lebih bermoralnya pendekatan kekuasaan, tetapi efektifitas politik pendekatan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Aktor politik sudah bisa memilih, kapan harus menggunakan kekuasaan, kapan harus menggunakan pendekatan hukum maupun persuasive.

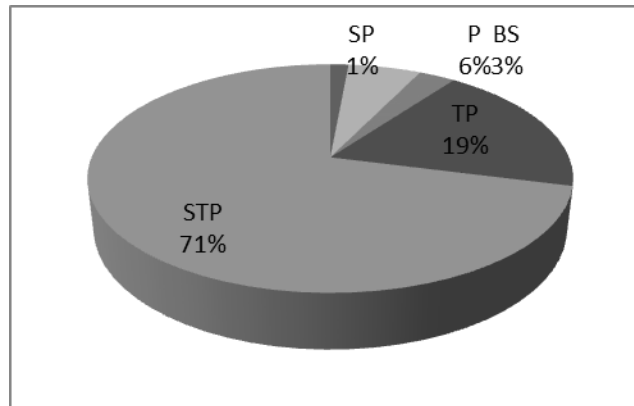
6. Kekerasan

Proses penyelesaian konflik melalui media kekerasan didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian dengan menggunakan kekerasan fisik maupun ancaman-ancaman verbal terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Politik sejatinya sebagai mekanisme pengaturan sumberdaya dan kepentingan dengan menggunakan cara-cara damai. Namun, dalam konteks tertentu politik juga sering difahami sebagai fenomena *politicking*, yakni bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara memarginalkan pihak lain.

Bagaimana pandangan aktivis partai politik di Yogyakarta? Dalam diagram berikut bisa dibaca beberapa hal terkait dengan penggunaan instrument kekerasan sebagai media penyelesaian konflik.

Diagram 11

Model penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Kekerasan



Sumber: Data Primer

Dari diagram di atas tercermin bahwa adalah sekitar lebih dari 90% responden menyatakan bahwa penggunaan kekerasan sebagai media penyelesaian konflik ada sesuatu yang tidak berguna. Konflik Politik merupakan sesuatu yang lumrah dalam partai politik, namun penggunaan kekerasan adalah sesuatu yang tidak lumrah, bahkan harus dihindari bersama. Argumen dasar yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah kekerasan justru akan menambah masalah. Kekerasan justru akan melahirkan kekerasan baru, sebagaimana efek spiral kekerasan.

Namun ada sekitar 10% responden yang menyatakan bahwa kekerasan sebagai media penyelesaian konflik adalah biasa, bahkan sangat penting. Dalam FGD terungkap bahwa penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik politik sekarang ini termasuk pandangan yang minor, namun dalam batas tertentu pandangan ini masih eksis. Argumen dasar yang dikembangkan adalah kekerasan bisa difahami sebagai bentuk terapi kejutan dan *punishment* sehingga tidak menggunakan instrument kekerasan untuk memperjuangkan politik. Cara ini juga digunakan sebagai sarana mendisiplinkan partai politik.⁶⁰

E. Pengetahuan Aktivist Partai Politik terhadap Nilai Jawa dan Resolusi Konflik

Dalam sub bab ini akan dianalisis seputar pengetahuan para aktivis partai politik terhadap 10 nilai yang telah dipilih peneliti dari beberapa kitab Jawa, maupun yang

⁶⁰ Diskursus ini sempat ramai, namun peserta FGD menganggap cara-cara kekerasan sudah tidak pada tempatnya dipergunakan sebagai sarana penyelesaian konflik.

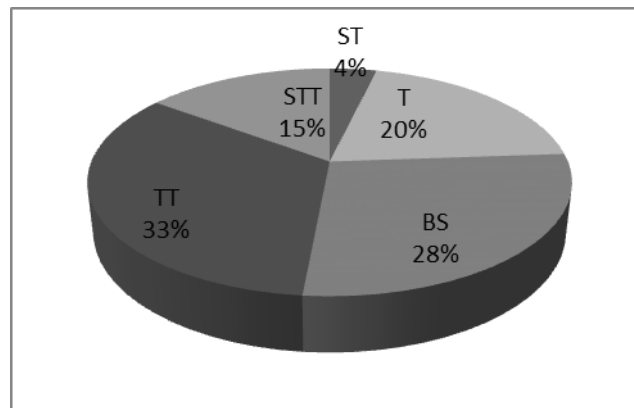
disarankan peserta FGD. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan aktivis partai politik terhadap nilai Jawa yang bisa dikembangkan sebagai nilai resolusi konflik, dan bagaimana para aktivis partai politik dalam mengartikulasikan nilai tersebut apakah secara sadar ataupun tidak. Hal ini terungkap dalam FGD bahwa banyak aktivis partai politik mengartikulasikan nilai-nilai resolusi konflik yang berbasis nilai Jawa, meskipun sebenarnya ia tidak tahu persis akan makna nilai tersebut. Atau bahkan terdapat aktivis partai politik yang kebetulan tidak memiliki latar belakang darah Jawa, namun karena memiliki pengalaman pendidikan di Yogyakarta, sehingga mengartikulasikan gaya politik dengan aksentuasi Jawa.

1. Pengetahuan terhadap Kitab-kitab Jawa

Yang dimaksud dengan mengetahui kitab-kitab Jawa adalah bisa menyebutkan minimal 5 kitab Jawa secara acak. Dalam penelitian ini terdapat kurang lebih 20 kitab yang membahas tentang nilai Jawa, baik dalam konteks Kitab Klasik ataupun ulasan tentang kitab klasik dari para penulis maupun budayawan di Yogyakarta.

Diagram 12

Derajat Pengetahuan Responden terhadap Kitab-Kitab Jawa



Sumber: Data Primer

Ada temuan menarik dari survei ini bahwa hanya ada sekitar 24% responden yang mengetahui keberadaan kitab-kitab Jawa yang adiluhung. Yang sangat tahu hanya sekitar 4%. Fenomena ini semakin membenarkan pandangan dari Nasrudin Anshory yang menyatakan banyak orang Jawa semakin tidak “Jawani”, semakin tercerabut identitas kulturalnya. Partai politik sebagai salah satu pilar masyarakat dalam bangunan kekuasaan, tampaknya lebih akrab dengan buku-buku politik kontemporer, yang

seringkali bersumberkan dari nilai-nilai asing, semisal Yunani, Barat, Cina maupun Arab. Ada sekitar 48% dari responden menyatakan tidak tahu secara persis keberadaan kitab-kitab Jawa, dan sekitar 28% menyatakan antara tahu dan tidak tahu.

Alasan ketidaktahuan ataupun ketidakpekaan terhadap kitab Jawa, terutama yang klasik, sangat bisa difahami karena lebih pada persoalan ketersediaan kita tersebut dalam jumlah yang memadai dan mudah diakses. Meskipun di Yogyakarta merupakan salah satu representasi kota budaya, bukanlah jaminan bahwa kitab-kitab klasik Jawa bisa diakses dengan mudah. Dalam FGD terungkap bahwa pengetahuan tentang nilai Jawa bukanlah diperoleh dengan membaca secara langsung terhadap kitab-kitab tersebut. Nama-nama kitab justru hanya diperoleh dari pelajaran sejarah tatkala di sekolah, dan tidak pernah memegang kitab Jawa yang dimaksud. Bahkan salah seorang peserta FGD mengatakan bahwa ada fakta dalam sejarah kelahiran kabupaten tertentu, perlu dikaji ulang apakah sudah benar-benar betul atau hanya dugaan.⁶¹

28% responden yang menyatakan mengetahui keberadaan kitab Jawa secara biasa-biasa saja, dimaknai sebagai kondisi responden tidak begitu menyakini keberadaan kitab-kitab tersebut. Apakah kitab tersebut memang sebagai kitab yang berurat-berakar dari pengalaman para pujangga Jawa, ataukah hanya saduran dari kitab di Negara lain, atau bahkan hanya fiksi semata yang sulit dilacak kebenaraannya.⁶² Apakah memang kitab tersebut memang Kitab Jawa atau yang hanya di Jawa-Jawakan.

2. Pengetahuan terhadap Gaya Berkonflik Dalam Kitab Jawa

Sama halnya dengan pengetahuan tentang Kitab Jawa, sebagian besar responden 42% menyatakan tidak tahu. Sedang yang menyatakan tahu dan sangat tahu hanya sekitar 37%, dan 21% menyatakan hanya sekedar mengetahui di permukaan. Gaya konflik yang dimaksud dalam kitab Jawa, sebenarnya tercerminkan dalam konteks huruf-huruf Jawa, Ha Na Ca Ra Ka, Da Ta Sa Wa La, Po Dho Jo Yo Yo, Mo Go Bo Tho Ngo. Ataupun beberapa gaya konflik yang ditampilkan dalam beberapa setting wayang, apakah gaya

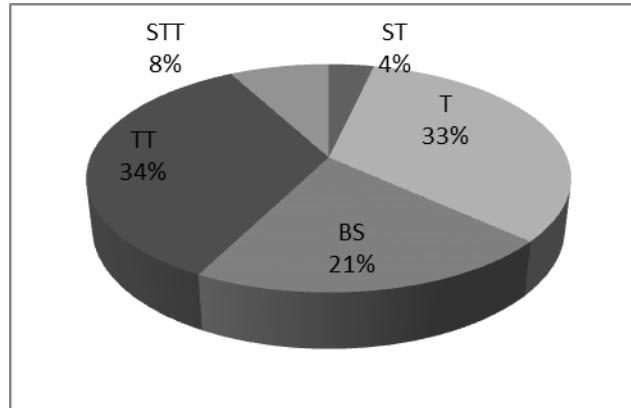
⁶¹ Fakta ini diungkapkan oleh Suharwanto dalam FGD yang dilaksanakan oleh Peneliti pada 9 Agustus 2009. Atas permintaan peserta, info secara rigid tidak ditulis agar tidak menimbulkan kontroversi.

⁶² Salah satu kitab yang kontroversial adalah serat Darmogandhul, masing-masing fihak saling melakukan klaim dengan menggunakan justifikasi sebagai penafsir terbenar tentang tokoh Sabdo Palon. Tokoh yang menjadi sentrum dalam dialektika serat Darmogandul.

Yudistira, Werkudoro, Jannoko, Nakula Sadewa, Resi Bisma, Resi Durna, Kresna, Wibisana, Anoman, Rama, Satrio Pingit ataupun para kesatria dari negeri Barata lainnya.

Diagram 13

Pengetahuan terhadap Gaya Berkonflik Dalam Kitab Jawa



Sumber: Data Primer

Memang tidak banyak buku yang langsung membahas gaya konflik orang Jawa, namun terdapat beberapa idiom-idiom yang beraroma konfrontasi terkait dengan konflik seperti “Uncali Sikil”, sebuah gaya konflik dari Werkudoro, Ajur Sewalang-Walang, Rawe-Rawe rantas, malang-malang putung, tumpes kelor, ojo takon doso ataupun idiom yang beraroma akomodatif wani nglah dhuwur wekasane, Ngonono Yo Ngonono Ning Ojo Ngonono. Nek Ono rembug yo dirembug lan ojo sak karepe dhewe. Idiom-idiom tersebut seringkali ditemukan dalam pilihan kalimat yang dipilih oleh para dhalang atau pelaku dari pentas ketoprak.

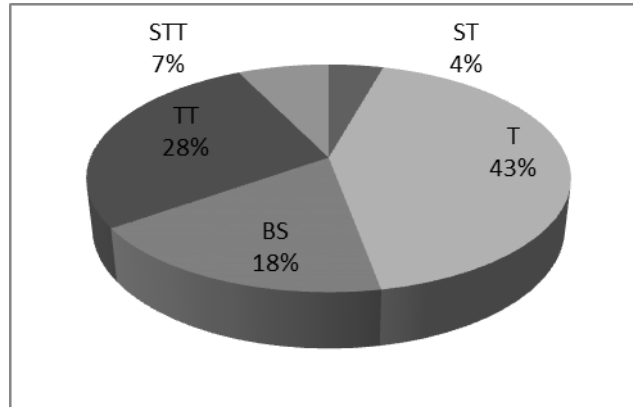
3. Nilai Jawa Memiliki Nilai Resolusi Konflik

Dalam survai ditemukan bahwa responden mengetahui bahwa dalam nilai-nilai Jawa terdapat nilai-nilai yang bisa dieksplorasi sebagai nilai resolusi konflik. Ada sekitar 47% menyatakan bahwa mereka mengetahui dan yakin bahwa nilai Jawa dapat diimplementasikan dalam politik, dan berpengaruh terhadap de-eskalasi dari konflik politik. Bahkan pandangan ini tercermin dari pandangan John Keban, yang sejatinya bukan orang Jawa melainkan orang Flores. Bahwa nilai merupakan asset berharga yang bisa digali bagi kehidupan politik yang lebih baik.⁶³

⁶³ Ungkapan John Keban ini kemudian mendapatkan respon positif dari peserta FGD, yang sebelumnya menyakini bahwa nilai Jawa mulai luntur dan dianggap tidak memiliki relevansi untuk diterapkan dalam kehidupan politik.

Diagram 14

Pandangan Terhadap Nilai Jawa Memiliki Nilai Resolusi Konflik



Sumber: Data Primer

Hal senada juga disampaikan oleh Suharwanto, yang sejatinya adalah sarjana Teknik, namun dengan kapasitas untuk mengelola dinamika politik berbasis nilai Jawa, memungkinkannya menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Bantul dan sekarang menjadi anggota DPRD Propinsi Yogyakarta. Nilai Jawa dalam pandangannya merupakan asset bagi masyarakat Jawa untuk bisa mengelola demokrasi.⁶⁴

Dari 10 nilai Jawa yang ditawarkan dalam penelitian ini, para peserta FGD, melihat bahwa nilai Jawa sebagai nilai yang bisa dieksplorasi lebih jauh, dan dikomunikasikan satu sama lain dalam pola kehidupan di masyarakat. Yang juga tak kalah pentingnya, nilai-nilai tersebut harus juga disemikan ke dalam generasi muda, yang sudah semakin luntur kefahamannya terhadap nilai Jawa.

F. Relevansi Nilai Jawa Sebagai Nilai Resolusi Konflik Nilai Jawa apakah relevan sebagai nilai resolusi konflik

Dari kuisisioner yang kami bagikan kepada para pengurus dan anggota parpol, kami menemukan 49% responden yang menyatakan aktif terlibat dalam konflik yang melibatkan parpol mereka. Keaktifan ini dalam bentuk provokasi, mobilisasi, dan bertindak dilapangan sebagai orang yang hanya mengikuti provokasi pimpinan konflik.

⁶⁴ Ibid

Tiga puluh persen diantara mereka menyatakan aktif juga didalam konflik yang melibatkan sampai pada tahap eskalasi dengan penggunaan kekerasan. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas keterlibatan seseorang atau parpol dalam suatu konflik sangat tergantung dari kepentingan dan perolehan apa yang akan didapat dari hasil berkonflik.

Keterlibatan parpol dalam berkonflik dibarengi dengan pilihan berkonflik yang rata-rata memilih akomodasi (37 %) dan kompromi (43 %). Pada konflik yang melibatkan parpol lain, kecenderungan parpol untuk berkompromi. Sedangkan ketika terjadi konflik internal partai, mereka cenderung menggunakan taktik akomodasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa parpol tidak menghendaki suatu hasil konflik yang *zero sum game*. Pilihan moderat untuk mendapatkan suatu hasil yang tidak maksimal dari pada kehilangan segalanya menjadi modal bagi pengembangan resolusi konflik yang mampu menghasilkan kompromi.

Taktik berkonflik yang cenderung akomodasi dan kompromi ini selaras dengan nilai-nilai Jawa yang mengedepankan harmoni dalam hubungan sosial. Ungkapan "*ono rembug yo dirembug*" (kalau ada permasalahan dirundingkan untuk menemukan solusi) menjadi selaras dengan upaya akomodasi dan kompromi. Filosofi ini sekaligus memomorduakan taktik konfrontasi yang ada dalam ungkapan "*tumpes kelor*" yang maknanya konflik habis-habisan dengan adanya kebinasaan di pihak lawan (*zero sum game*).

Sebagai sebuah fenomena sosial dan politik, konflik akan selalu muncul dan oleh sebab itu parpol harus selalu siap melakukan manajemen atau resolusi konflik. Kesadaran parpol akan fungsi resolusi konflik ini dapat kita lacak cukup tinggi dengan jawaban responden di mana 52 % mengatakan pentingnya penyelesaian konflik melalui proses damai yaitu dialog. Hal yang semakin memperkuat kesadaran akan pentingnya dialog juga bisa kita lihat dari 59 % responden mengatakan tidak penting menyelesaikan konflik dengan politik kekerasan. Kesadaran ini mengindikasikan adanya potensi partai politik untuk menjadi agen resolusi konflik baik yang terjadi di ranah politik maupun kehidupan masyarakat secara umum.

Sebagai partai politik yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tentunya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh budaya Jawa sebagai budaya yang

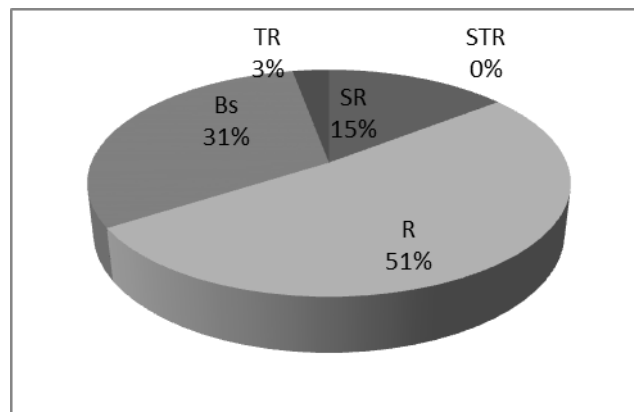
mayoritas dianut oleh masyarakat Jawa. Budaya menjadi faktor yang penting bagi seseorang dalam menghadapi konflik. Kalau kita melihat dialektika sikap, perilaku, dan kontradiksi yang terjadi dalam suatu konflik, maka sikap dan perilaku seseorang dalam berkonflik akan dipengaruhi salah satunya faktor budaya. Khasanah budaya Jawa ternyata banyak kita jumpai nilai-nilai adiluhung yang bisa menginspirasi seseorang untuk bersikap dan berperilaku dalam berkonflik. Dalam konteks inilah, maka penting bagi partai politik untuk menggali dan menginstitutionalisasi nilai-nilai Javanese wisdom sebagai inspirator dalam menjalankan fungsi resolusi konfliknya.

Analisis ini dikembangkan dari temuan hasil survei yang kemudian dieksplorasi dalam forum FGD, dan ditambah dengan melakukan wawancara kepada pakar yang memiliki kajian studi tentang studi Jawa.

Secara umum, responden melihat bahwa 10 nilai Jawa dalam penelitian ini memiliki relevansi untuk diterapkan dalam konteks penyelesaian beragam konflik politik, baik di tingkat local maupun nasional. Hal ini tercermin pandangan responden yang menyatakan bahwa 66% responden sepakat bahwa nilai Javanese Wisdom memiliki relevansi yang tinggi. Alasan utama dari pandangan ini adalah *Desa Mowo Toto Mowo Coro* (masyarakat itu diatur dengan aturan tertentu dan cara tertentu). Berpolitik dengan menggunakan nilai tradisional, akan mudah difahami oleh para konstituen dan dapat menghindari kemungkinan distorsi pemahaman atau makna.

Sedangkan ada sekitar 31% responden yang menyatakan bahwa relevansi nilai Javanese Wisdom sebagai nilai Jawa hanya biasa-biasa saja. Argumentasi dasar pandangan ini adalah bahwa setting masyarakat di Jawa atau di Jogja pada khususnya, tidak bisa digeneralisir sebagai masyarakat agraris yang mengedepankan prinsip harmoni. Masyarakat di Jogja telah tumbuh menjadi masyarakat yang plural, sehingga terlalu mengagungkan nilai Jawa tanpa reserve justru akan menimbulkan penyakit chauvinism yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dari konstituen politik yang mungkin tidak memiliki geneologis Jawa, namun sudah menjadi penduduk Jawa atau Jogja secara permanen. Diperlukan adaptasi ulang nilai Javanese Wisdom tersebut untuk kemudian bisa diaktual secara baik.

Diagram 15
Relevansi Nilai Jawa Sebagai Nilai Resolusi Konflik



Sumber: Data Primer

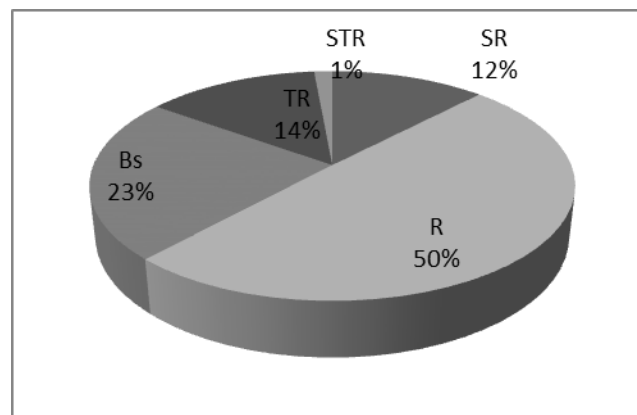
Hanya sekitar 3% responden yang menyatakan bahwa nilai Javanese Wisdom tidak relevan untuk digunakan sebagai nilai-nilai resolusi konflik dalam politik. Alasan utama tidak relevannya nilai Jawa sebagai nilai resolusi konflik adalah pemaknaan terhadap nilai Jawa yang cenderung bersifat fatalistik. Semisal nilai, *Alon-alon waton klakon*, banyak difahami sebagai nilai yang tidak progresif, dan bahkan fatalis. Ataupun nilai *mangan ora mangan waton kumpul*, juga sering disalah mengerti oleh orang Jawa yang sudah tidak Jawani atau orang luar Jawa yang tidak kenal Jawa.

1. Relevansi Nilai Ngluruk Tanpo Bolo

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di awal bab ini, nilai Ngluruk tanpa bolo, dimaknai sebagai upaya melakukan konflik dengan fihak dengan tidak melakukan mobilisasi kekuatan secara tidak terukur. Segala sesuatu harus diperoleh secara kesatria. Dalam pandangan responden tercermin bahwa nilai ngluruk tanpo bolo diyakini memiliki relevansi yang tinggi. Terdapat sekitar 62% responden menyatakan bahwa nilai ini memang layak untuk difahami dan dipraktikkan dalam ragam kehidupan, tidak terkecuali

dalam konflik politik. Argumentasi dasar dari pandangan ini adalah nilai sebagai bagian dari upaya mengurangi intensitas konflik maupun perluasan konflik. Konflik yang lebih focus dan tidak tersebar akan memungkinkan proses mencari solusi alternative bagi penyelesaian konflik menjadi lebih terbuka. Dalam Nilai ini terkandung pesan, bahwa dalam konflikpun juga harus taat asas atau aturan. Segala sesuatu termasuk di dalamnya konflik, jika dilakukan dengan prinsip kesatria akan menghasilkan hasil yang baik.

Diagram 16
Relevansi Nilai Ngluruk Tanpo Bolo



Sumber: Data Primer

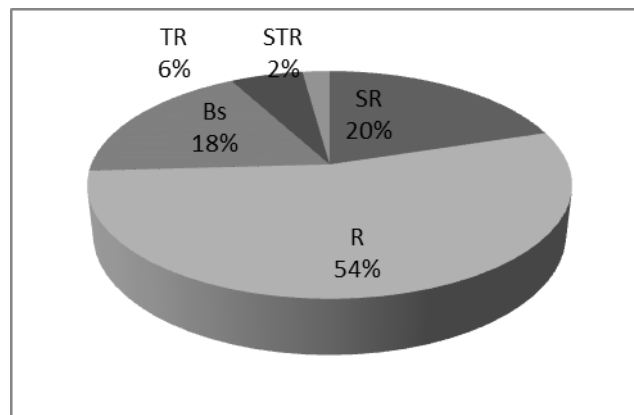
Pada sisi yang lain, terdapat sekitar 23% yang menyatakan bahwa relevansi nilai ini dalam kategori biasa-biasa saja. Derajat relevansinya sangat tergantung oleh kebutuhan aktor yang berkonflik ataupun derajat konflik itu sendiri. Dalam konteks politik di Yogyakarta akhir-akhir ini, para elit politik Jogjapun dalam berkonflik dengan pemerintah Pusat juga melakukan politik mobilisasi dalam bentuk deklarasi atau pasewakan agung. Forum-forum pengerahan masa, justru banyak dilakukan para elit politik untuk melakukan show of force. Show of force ini diharapkan dapat merubah opini dan kebijakan pemerintah pusat terhadap status keistimewaa di Jogja dan kraton pada umumnya, dan elit politik pada khususnya.

2. Relevansi Menang Tanpo Ngasorake

Nilai menang tanpo Ngasore dimaknai sebagai mengalahkan fihak lain tanpa membuat fihak yang dikalahkan dipermalukan di depan public. Proses kemenangan

dilakukan melalui kompetisi yang fair, sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Dalam survai ditemukan bahwa nilai ini memiliki relevansi yang tinggi sebagai nilai resolusi konflik, bahkan lebih besar dibandingkan dengan nilai Ngluruk Tanpo Bolo. Dalam konteks studi resolusi, prinsip ini memiliki keterdekatan dengan prinsip *non zero sum game*, di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak memperoleh kemenangan secara mutlak ataupun kalah secara mutlak, atau kemenangan diperoleh secara fairness, sehingga yang kalah dan menang tidak saling mengeksploitasi.

Diagram 17
Relevansi Menang Tanpo Ngasorake



Sumber: Data Primer

Dalam diagram di atas tercermin bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa nilai Menang Tanpo Ngasore sedemikian relevan, bahkan lebih tinggi relevansinya (74%) dibandingkan dengan nilai Ngluruk Tanpo Bolo (72%). Tingginya relevansi nilai ini berangkat dari pandangan bahwa memenangkan sesuatu dengan cara mengiritasi pihak yang kalah justru akan membuat kemenangan tersebut menjadi minor. Menempatkan kompetitor politik sebagai “musuh” secara absolut justru malah menjebak langkah-langkah politik. Adagium politik yang menyatakan bahwa tidak ada musuh dan kawan yang sejati, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi.⁶⁵

Sedangkan terdapat sekitar 18% yang menyatakan derajat relevansi nilai ini biasa-biasa saja. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai ini bukanlah nilai yang

⁶⁵ Hal ini disampaikan oleh hampir semua peserta dalam forum FGD yang dilaksanakan 9 Agustus 2009

spesial, karena sesungguhnya dalam politik terutama dalam konteks persaingan dalam internal partai politik, justru nilai ini jarang sekali dipergunakan. Lebih-lebih dalam konteks penentuan daftar urutan caleg yang berbasis suara terbanyak, justru masing-masing caleg saling menjatuhkan satu sama lain. Kecenderungan ini dalam pandangan Suharwanto terjadi karena terjadi pergeseran kompetisi dari lintas partai ke dalam internal partai dengan memperebutkan konstituen yang sama.⁶⁶ Konteks menang tanpa ngasore justru akan sangat relevan untuk membangun dinamika konflik dalam demokrasi, di luar ruang kompetisi untuk rekrutmen.

3. Relevansi Wani Ngalah Dhuwur Wekasane

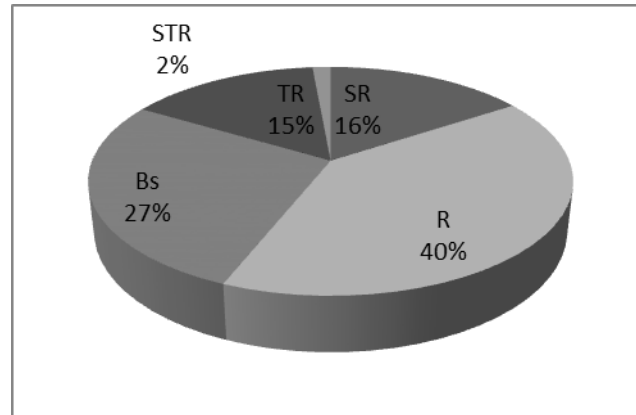
Wani ngalah dhuwur wekasane dimaknai sebagai sikap untuk mencoba mengalah guna memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mendapatkan sesuatu, dan memungkinkan di waktu berikutnya kita mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Nilai ini dalam konteks politik seringkali dianggap absurd. Dalam kompetisi tak ada kata “mengalah”, bahkan dalam konteks kompetisi olah raga, niat baik sebuah tim untuk mengalah karena sudah menduduki posisi aman dengan memberikan kesempatan pada pihak lawan untuk memenangkan pertandingan untuk mendapatkan kesempatan maju dalam pertandingan berikutnya justru dianggap permainan culas. Politik adalah arena pertarungan yang sangat ketat, mengalah berarti akan kalah. Sehingga bukanlah kemusykilan jika kemudian seorang aktor politik yang mencoba mengalah justru akan mendapatkan kemalangan secara beruntun, seperti ungkapan antisepsis dari nilai ini, *wani ngalah dhuwur rekasane*.

Bagaimana pandangan responden menyikapi nilai ini dalam konteks resolusi konflik. Diagram di bawah akan memberikan informasi bagaimana para aktivis partai politik di Yogyakarta memaknainya.

Diagram 18

Relevansi Wani Ngalah Dhuwur Wekasane

⁶⁶ Pendapat ini disampaikan Suharwanto dalam FGD



Sumber: Data Primer

Dalam diagram tersebut tergambar bahwa aktivis partai politik di Jawa menyakini bahwa nilai Javanese wisdom, *wani ngalah dhuwur wekasane*, memiliki relevansi yang tinggi sebagai nilai resolusi konflik sebesar 56%. Nilai ini dianggap efektif dalam menyelesaikan konflik yang terkait dengan issue-issue yang tidak bersifat transaksional. Namun ada sekitar 27% responden yang menyatakan bahwa relevansi nilai *wani ngalah dhuwur wekasane* memiliki derajat relevansi yang biasa saja, bahkan ada sekitar 17% menganggap nilai ini tidak relevan.

Dalam FGD ditemukan bahwa relevansi nilai *Wani Ngalah Dhuwur Wekasane* terletak pada kemampuan untuk mengendalikan diri dalam konflik, sehingga konflik tidak akan berekskalasi secara tidak beraturan. Namun kelompok yang memandang relevansi nilai ini rendah, lebih didasarkan argumentasi bahwa “mengalah” dalam politik adalah sebuah tindakan yang naif sehingga kemungkinan kompetitor politiknya akan “glunjak” (meminta lebih dari yang seharusnya diperoleh). Sehingga muncul pemelo yang menyatakan bahwa “wani ngalah dhuwur rekasane” (jika berani mengalah maka justru akan mendapatkan kerugian yang lebih banyak).⁶⁷

Aktivis dari partai-partai besar berkecenderungan tidak menerapkan nilai ini, karena dianggap justru akan berpotensi mengurangi perolehan politik. Namun nilai ini sering dipakai oleh partai politik menengah, untuk memperoleh ruang bisa berkomunikasi dengan partai-partai besar. Dalam konteks studi negosiasi, pilihan partai-partai menengah menggunakan nilai ini merupakan cerminan strategi “*Yielding*”, sedangkan pilihan untuk tidak menggunakan nilai ini sebagai cerminan strategi “*Contending*”.

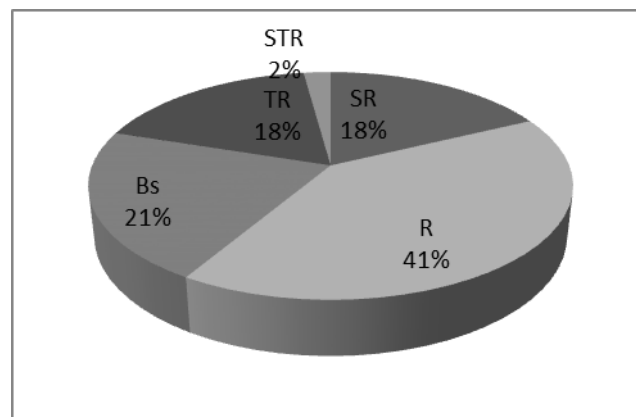
⁶⁷ Hal ini diungkapkan para peserta FGD yang dilakukan pada 9 Agustus 2009

4. Relevansi Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe

Nilai *sepi ing pamrih rame ing gawe* dimaknai sebagai sikap untuk tidak menunjukkan intensi (niat atau pamrih) politik dalam melakukan sesuatu, namun lebih mengedepankan prinsip-prinsip kerja. Nilai ini dalam konteks tata kepemimpinan organisasi sebagai cerminan sikap kedewasaan kepribadian, sebuah sikap untuk tidak sombong, angkuh maupun riya. Karena justru dengan sikap sombong, atau *adigang adigung adiguna* justru akan membuat prestasi kerja seseorang justru semakin tak berarti.

Diagram 19

Relevansi Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe



Sumber: Data Primer

Dalam diagram di atas tercermin bahwa responden menganggap bahwa nilai ini memiliki relevansi yang tinggi (59%) dibandingkan dengan nilai *wani ngalah dhuwur wekasane*. Nilai ini juga dianggap responden lebih realistis dibandingkan dengan nilai *wani ngalah dhuwur wekasane* yang seringkali mengalami makna yang tidak tepat atau pejoratif. Nilai untuk bekerja keras sebaik-baiknya, difahami oleh responden akan sangat berarti bagi terselesaikannya konflik politik. Konflik harus diurai satu per satu, sehingga akan terkonfigurasi secara jelas peta konflik sesungguhnya. Dalam konteks politik di Yogyakarta, terkait dengan masalah posisi keistimewaan, akan bisa terselesaikan secara baik dan elegan manakala pihak-pihak yang berkonflik maupun aktor yang memediasinya secara serius melakukan ikhtiar untuk mencari jalan yang terbaik, bukan mencari keuntungannya sendiri-sendiri.

Dari diagram ini tercermin bahwa relevansi nilai Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe mencapai hampir 59%. Relevansi nilai ini dibandingkan dengan nilai *Wani Ngalah*

Dhuwur Wekasane relative lebih rendah. Argumentasi besar dari pandangan bahwa *Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe* relevan adalah bahwa nilai ini akan membuat politik semata-mata tidak difahami sebagai gejala transaksional atau dagang sapi kekuasaan. Jika fenomena politik lebih difahami sebagai fenomena ini, maka moralitas politik akan tergerus. Politik bukanlah semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan, namun juga untuk mendapatkan kemuliaan di mata konstituen. Dalam FGD terungkap bahwa banyak partai politik seringkali menunjukkan ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, tatkala partai politik tersebut tidak mengalami dilemma-dilema kekuasaan. Kata-kata manis biasanya mengalir pada waktu kampanye, namun tatkala harus mengeksekusi kebijakan, kata-kata manis dalam kampanye sering terlupakan.

Terdapat sekitar 20% responden menyatakan bahwa nilai *Sepi Ing pamrih Rame Ing Gawe* sebagai nilai yang tidak relevan dalam diskursus konflik partai politik. Politik sebagai fenomena kekuasaan yang selama ini didefinisikan oleh partai politik sebagai sesuatu yang “penuh dengan pamrih” maupun kepentingan. Sehingga tidak ada yang gratis dalam politik, “*no free for lunch*”. Politik justru menunjukkan dinamika, jika aktor-aktor politik dapat mengartikulasikan politik kepentingan secara terbuka dan dipertukarkan.

5. Ngonu Yo Ngonu Ning Ojo Ngonu

Nilai *Ngonu Yo Ngonu Ning Ojo Ngonu* diusulkan dalam forum FGD oleh Suharwanto, sebagai salah satu nilai yang memiliki relevansi yang tinggi sebagai nilai resolusi konflik. Menurut pengalaman politiknya, nilai ini sering digunakan untuk memecah kebuntuan perbincangan politik yang mulai memanas dan tidak memiliki arah yang jelas karena dominannya politik “ngotot” atau mau menangnya sendiri. Nilai ini sering digunakan sebagai “joke”, sehingga pihak yang menjadi sasaran “joke” tersebut akan tidak enak sendiri.

Pandangan Suharwanto ini juga didukung oleh semua peserta FGD, bahwa dalam konteks di Yogyakarta, nilai Jawa sangat sering dipraktekkan oleh hampir semua aktivis partai politik. Nilai memang sangat pas dalam tekstur politik di Yogyakarta, dan memiliki keterdekatan makna dengan prinsip moderasi dalam demokrasi. Pandangan dari Agus Subagyo dari Golkar, menyatakan bahwa nilai ini memiliki daya kritis tersendiri dalam

politik yang bersifat transaksional. Politik bukan untuk diri sendiri saja, namun juga untuk pihak lain. Bahkan menurut pengalaman pribadinya, posisi bendahara DPC Partai Golkar Kabupaten Bantul, diperolehnya karena juga menerapkan prinsip ini tatkala berkonflik.⁶⁸

6. Relevansi Sing Iso Rembug Yo Dirembug lan Ojo Sak Gelem Dhewe

Nilai ini diusulkan oleh Suharwanto, sebagaimana nilai *Ngono Yo Ngono Ning Ojo, Ngono*. Secara harafiah nilai ini bermakna bahwa jika terdapat suatu masalah yang masih bisa diperbincangkan maka perbincangkanlah dan jangan semauanya sendiri. Suharwanto memaparkan bahwa nilai ini sangat relevan sebagai salah satu nilai resolusi konflik karena sedari awal nilai ini memberikan pesan bahwa penyelesaian terbaik adalah melalui proses permusyawaratan, dialog dan diskusi yang fair. Dan dalam proses mendialogkan kepentingan tersebut, harus juga dilandasi sikap untuk tidak mau menang sendiri. Prinsip ini menanamkan sikap untuk mengedepankan moderasi seperti kompromi dan akomodasi dibandingkan nilai konfrontasi.

Para peserta FGD sebagaimana nilai *Ngono Yo Ngono, ning Ojo Ngono*, juga memberikan persetujuannya. Nilai ini juga diyakini memiliki arti penting untuk membawa diskursus konflik ke dalam proses negosiasi secara damai, dan tidak menggunakan kekerasan fisik. Seorang John Keban, pengurus DPD Partai Golkar Yogyakarta, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap nilai ini. Dalam pandangannya, nilai ini memberikan ruang yang besar bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menata kembali konflik. Dialog diyakini sebagai mekanisme terbaik untuk menyelesaikan masalah, sekaligus mendapatkan kepentingan yang diperjuangkannya secara maksimal.

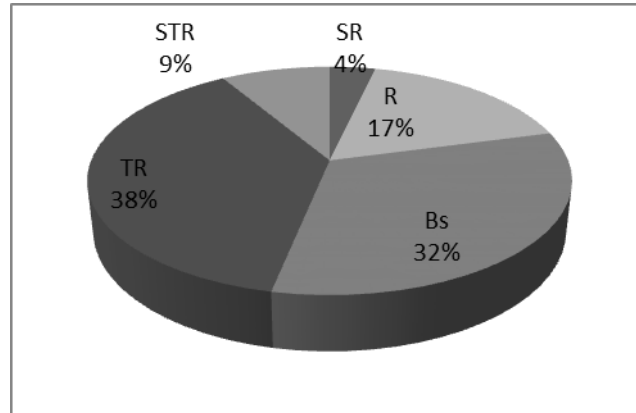
7. Alon-Alon Waton Klakon

Nilai ini memiliki makna harafiah bahwa berjalan sesuatu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, meskipun berjalan dengan lambat namun memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi. Nilai ini juga menawarkan tradisi untuk mendapatkan hasil melalui suatu proses panjang dan tidak bersifat instan. Bagaimana pandangan aktivis partai politik di Yogyakarta terhadap nilai ini?

⁶⁸ Pandangan ini disampaikan Agus Subagyo dalam FGD 9 Agustus 2009

Diagram 20

Relevansi Sing Iso Rembug Yo Dirembug lan Ojo Sak Gelem Dhewe



Sumber: Data Primer

Dari diagram ini tercermin bahwa nilai *alon-alon waton klakon*, sebagai nilai resolusi konflik difahami memiliki tidak memiliki relevansi yang tinggi. Hanya sekitar 21% yang menyatakan relevan, dan lebih dari 47% menyatakan nilai ini tidak relevan sebagai nilai resolusi konflik. Dan terdapat sekitar 32% yang menyatakan bahwa derajat relevansi nilai ini hanya biasa-biasa saja.

Menurut pandangan Suharwanto, banyak kalangan tidak memahami secara benar makna *alon-alon waton klakon*, sehingga terjadi penafsiran yang salah. Menurutnya nilai ini masih sangat relevan karena bisa mengendalikan ambisi politik jangka pendek yang justru menyebabkan konflik politik dalam partai politik menjadi tidak beraturan. Sedangkan argumentasi dasar yang menyatakan nilai ini tidak relevan sebagai nilai resolusi konflik adalah nilai ini justru menimbulkan nalar fatalisme dan kehati-hatian yang berlebih-lebihan. Nilai resolusi konflik harus didesain secara progressif sehingga begitu ada kesempatan untuk menyelesaikan konflik harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.⁶⁹

8. Relevansi Ing Ngarso Sung Tulodho

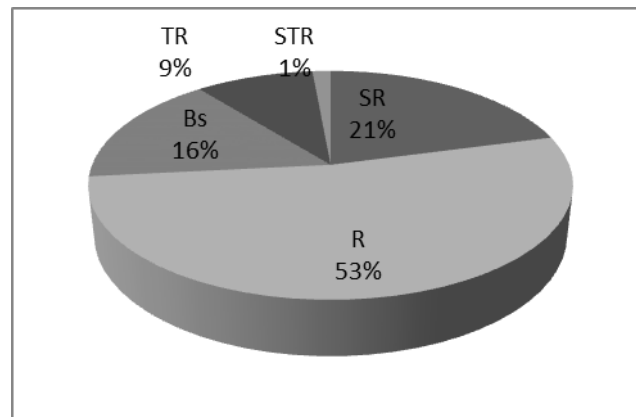
Secara harafiah nilai ini memiliki makna bahwa siapa saja yang berada di depan (menjadi pemimpin) maka hendaknya membangun ketauladan bagi siapa yang dipimpinnya. Nilai ini memang sangat berakar dalam tradisi masyarakat tradisional, yang memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Penghormatan ini sebagai

⁶⁹ Hal ini diungkapkan oleh Suharwanto terkait dengan pandangan peserta FG yang menyatakan nilai *alon-alon waton klakon* tidak memiliki relevansi sebagai nilai resolusi konflik

kewajaran, karena orang yang lebih tua memiliki pengalaman hidup yang lebih luas, sehingga biasanya memiliki kedewasaan dalam berfikir dan bertindak.

Bagaimanakah pandangan responden terhadap derajat relevansi nilai ini sebagai salah satu pembangun resolusi konflik politik?

Diagram 21
Relevansi Ing Ngarso Sung Tulodho



Sumber: Data primer

Dari data ini tercermin bahwa nilai *Ing Ngarso Sung Tulodho* diyakini memiliki relevansi yang tinggi sebagai nilai resolusi konflik dalam partai politik. Tidak kurang dari 74 responden menyatakan persetujuannya. Argumentasi dasar dari relevansi nilai ini adalah adanya pandangan dari responden bahwa konflik dalam partai politik sejatinya lebih banyak diciptakan oleh para elit politik itu sendiri. Sebagaimana dicontohkan oleh John Keban yang menyatakan bahwa banyak elit kemudian memunculkan konflik dalam partai politiknya, tatkala aspirasinya tidak mendapatkan tempat di partai, sehingga kemudian membuat partai politik baru yang bisa menjamin terakomodasinya kepentingannya.⁷⁰ Munculnya perpecahan dalam partai politik lebih disebabkan oleh kekecewaan elit daripada tuntutan konstituen. Terlembaganya nilai Ing Ngarso Sung

⁷⁰ Hal ini diungkapkan John Keban dalam FGD 9 Agustus 2009

Tulodho dalam tubuh kepartaian diyakini oleh peserta FGD akan membuat intensitas perpecahan dalam partai politik akan bisa berkurang.

Hanya sekitar 10% responden yang menyatakan bahwa nilai ini tidak relevan. Argumennya terletak pada pandangan bahwa dalam politik membutuhkan prinsip egalitarian. Tidak hanya pemimpin yang harus menjadi tauladan bagi masyarakat konstituennya, namun para konstituen juga harus menjadi tauladan pula. Konflik justru akan bisa diselesaikan dengan baik jika masing-masing yang berkonflik mengartikulasikan dengan baik sehingga ditemukan titik temua bersama. Jika konflik diselesaikan dengan langsung melibatkan tokoh kunci dari partai politik, justru penyelesaian konflik menjadi artificial karena sedemikian besarnya ruang intervensi dari pemimpin.

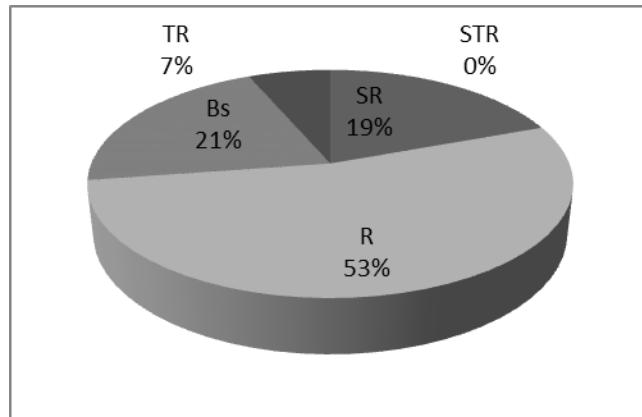
9. Relevansi Ing Madyo Mangun Karso

Makna dari Ing Madyo Mangun Karso adalah kelompok masyarakat yang berada di tengah, hendaknya mengedepankan inisiatif dan proaktif dalam menjalankan peran penghubung antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Dalam pandangan responden, nilai ini memiliki relevansi yang paling tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain, di mana mencapai 73%. Tingginya relevansi nilai ini didasarkan pandangan bahwa aktor resolusi konflik haruslah memiliki kompetensi untuk menetralkan suasana, sehingga pihak-pihak yang berkonflik mampu berfikir secara obyektif dan proporsional.

Sedangkan ada sekitar 7% responden menyatakan bahwa nilai ini tidak relevan sebagai nilai resolusi konflik. Agrrume

Diagram 22

Relevansi Ing Madyo Mangun Karso

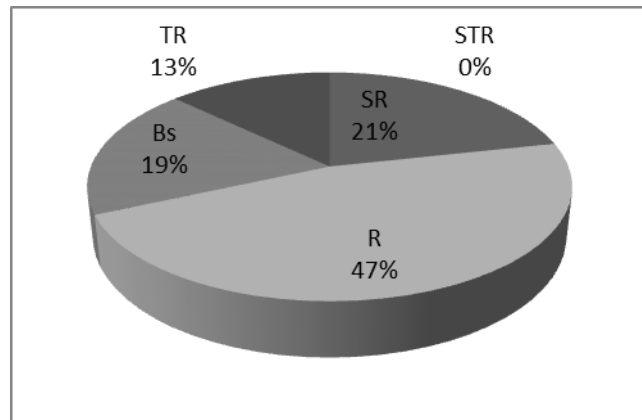


Sumber: Data Primer

10. Relevansi Tut Wuri Handayani

Diagram 22

Relevansi Tut Wuri Handayani



Sumber: Data Primer